

**IMPLEMENTASI MODAL SOSIAL UNTUK
MENGATASI KREDIT BERMASALAH
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI
KABUPATEN MALANG
(Studi Kasus Pada BPR XYZ Cabang Kepanjen)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

**JULIA RUSDIANA EKA PRATIWI
115020400111035**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Implementasi Modal Sosial Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Bpr XYZ Cabang Kepanjen)"

Yang disusun oleh :

Nama : Julia Rusdiana Eka Pratiwi
NIM : 115020400111035
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **03 JULI 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ajeng Kartika Galuh, SE., ME
NIP. 201201 851221 2 001
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. Ghozali Maski., SE., MS
NIP. 19580927 198601 1 008
(Dosen Penguji I)
3. Yenny Kornitasari, SE., ME.
NIP. 201507 881001 2 001
(Dosen Penguji II)

Malang, 03 JULI 2018
Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi

Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.
NIP. 19691210 199703 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Implementasi Modal Sosial Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Malang
(Studi Kasus Pada BPR XYZ Cabang Kepanjen)**

Yang disusun oleh :

Nama : Julia Rusdiana Eka Pratiwi
NIM : 115020400111035
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.
NIP. 19691210 199703 1 003

Malang, 9 Mei 2018
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ajeng Kartika Galuh, SE., ME.
NIP. 201218512212001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Julia Rusdiana Eka Pratiwi**
Tempat, tanggal lahir : **Malang, 14 Juli 1993**
NIM : **115020400111035**
Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**
Konsentrasi : **Ekonomi, Keuangan dan Perbankan**
Alamat : **Jl. Candi Kalasan II no 1, Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Implementasi Modal Sosial Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Malang
(Studi Kasus Pada BPR XYZ Cabang Kepanjen)**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Mei 2018

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Ajeng Kartika Galuh, SE., ME.
NIP. 201218512212001

Yang membuat pernyataan,



Julia Rusdiana Eka Pratiwi
NIM. 115020400111035

Mengetahui,
Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME.
NIP. 19691210 199703 1 003

RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Julia Rusdiana Eka Pratiwi
Alamat di Malang : Jl. Candi Kalasan II no 1, Blimbing. Malang
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 14 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi / Berat Badan : 165 cm / 65 Kg
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Email : juliarusdianaeka@yahoo.co.id

PENDIDIKAN

Formal :

1998 – 1999 : TK Islam Sabilillah Malang
1999 – 2005 : SDN Blimbing III Malang
2005 – 2008 : SMPN 8 Malang
2008 – 2011 : SMAN 7 Malang
2011 – 2018 : Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya mengatasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh BPR XYZ Cabang Kepanjen dengan mengimplementasikan unsur-unsur yang terdapat pada modal sosial. Penelitian ini merupakan kajian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus di sesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Strategi penelitian ini didalam desainnya peneliti mengidentifikasi hakikat suatu fenomena berdasarkan pengalaman individu-individu yang berstatus sebagai nasabah BPR XYZ Cabang Kepanjen. Untuk itu, peneliti perlu mengkaji subyek penelitian dengan terlibat langsung guna mengembangkan pola-pola dan relasi makna-makna yang ada. Dan metode penelitian kualitatif dirasakan lebih cocok dan relevan dengan realitas yang akan diteliti karena berupaya menggali dan memahami bagaimana unsur-unsur modal sosial dapat mengatasi resiko kredit bermasalah pada BPR XYZ Cabang Kepanjen. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada nasabah dan BPR XYZ Cabang Kepanjen tentang keputusan nasabah dalam mengambil produk pinjaman dan keputusan BPR XYZ Cabang Kepanjen untuk menyetujui pengajuan kredit nasabah serta penanggulangan ketika terjadi kredit bermasalah dengan implementasi modal sosial, dapat diambil beberapa kesimpulan. Dengan unsur jaringan sosial, kreditur akan mendapatkan info mengenai kedisiplinan debitur dalam mengangsur, karakter debitur menyikapi pinjaman yang mereka ajukan dan sebagainya. Jaringan sosial yang kuat akan semakin memperjelas karakter dan cara berperilaku terutama ketika mengatasi masalah kredit bermasalah. Norma sosial yang berupa norma untuk tidak mencurangi orang lain akan mencegah debitur untuk melakukan tindakan yang akan merugikan mereka secara individu, mereka secara kelompok maupun pihak luar yang berinteraksi dengan mereka baik secara pribadi maupun kelompok. Norma sosial dan nilai-nilai yang dianut juga mempengaruhi perilaku pegawai bank. Mereka mengutamakan positif thinking atas semua yang terjadi dalam hubungan tersebut. Dan selalu mendahulukan cros check kondisi lapang sebelum menilai keterlambatan atau gagal bayar nasabah. Dengan adanya reciprocity, membuat sistem referensi nasabah semakin handal dan terpercaya. Petugas lapang dengan adanya referensi dari nasabah terpercaya sebelumnya, dapat mempersingkat waktu penilaian karakter calon debitur selanjutnya. Semakin singkatnya waktu yang dibutuhkan oleh petugas lapang untuk melakukan screening calon debitur, semakin cepat pula bantuan modal dicairkan oleh pihak bank. Kepercayaan yang merupakan dasar bagi lembaga perkreditan untuk memberikan kredit kepada nasabah merupakan bagian dari modal sosial. Nasabah yang dapat diberi pinjaman adalah nasabah yang memiliki reputasi yang baik. Nasabah dengan reputasi yang baik akan diasumsikan bahwa nasabah tersebut dapat dipercaya dan dapat bertanggungjawab terhadap kewajibannya.

Kata kunci: Modal Sosial, Unsur Partisipasi Dalam Jaringan dan Tindakan yang Proaktif, Unsur Norma dan Nilai Sosial, Unsur Reciprocity, Unsur Trust, Kredit Bermasalah, BPR

ABSTRAK

The purpose of this research is to know and analyze how effort to overcome problem loans conducted by BPR XYZ Kepanjen Branch by implementing the elements contained in social capital. This study is a phenomenological study using qualitative approaches, where in qualitative research designs that are constantly adjusted to the statement in the field. This research strategy in the descriptions of researchers to identify the essence of a phenomenon based on the experience of individuals who status as customers BPR XYZ Kepanjen Branch. For that, researchers need to examine the subject of research with direct involvement to develop patterns and relations of meaning-meaning that exists. And qualitative research methods are perceived to be more suitable and relevant to the reality to be studied as it seeks to explore and understand how the elements of social capital can overcome the risk of non-performing loans at BPR XYZ Kepanjen Branch. Based on the result of qualitative research with observation, interview and documentation technique done to customer and BPR XYZ Kepanjen Branch about customer decision to take loan product and decision of BPR XYZ Kepanjen Branch to approve credit application of customer and handling when problem loans with social capital implementation can be taken some conclusions. With elements of social networks, creditors will get info about the debtor's discipline in installments, the debtor's character to respond to the loan they submitted and so forth. Strong social networks will further clarify the character and manner of behaving especially when addressing the problem of problem loans. Social norms in the form of norms for not cheating others will prevent the debtor from engaging in actions that would harm them individually, those of a group or an outsider who interacts with them individually or in groups. Social norms and values adopted also affect the behavior of bank employees. They put positive thinking on everything that happens in the relationship. And always prioritize cross check field conditions before assessing the delay or default of customers. With the existence of reciprocity, make customer reference system more reliable and reliable. The field officer with reference from trusted customer before, can shorten the time of assessment of future debtor character. The shorter the time needed by field officers to screen the prospective borrowers, the faster the capital assistance is disbursed by the bank. Trust which is the basis for credit institutions to provide credit to customers is part of social capital. The customer who can be loaned is a customer with a good reputation. A customer with a good reputation will be assumed that the customer is trustworthy and can be held responsible for his / her obligations.

Keywords : Social Capital, Elements of Network Participation and Proactive Measures, Normal Elements and Social Values, Reciprocity Elements, Trust Elements, Problem Loans, BPR

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul :

“Implementasi Modal Sosial Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada BPR XYZ Cabang Kepanjen)”

Penyusunan Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan skripsi dan seminar proposal pada Jurusan Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Ide awal penulisan proposal skripsi ini timbul karena adanya fenomena perkembangan BPR dan kredit bermasalah di Kota Malang. Dengan selesainya penyusunan proposal ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada :

1. Ibu Ajeng Kartika Galuh, SE., ME. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan memberikan saran serta petunjuk dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rer. Prof. Wildan Syafitri., SE., ME selaku Ketua Jurusan Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
3. Seluruh staf Jurusan Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, terima kasih atas bantuannya
4. Mami dan Adek tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa henti serta limpahan kasih sayangnya selama ini
5. Teman-teman seangkatan dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, *thanks for all of support and keep our spirit on =)*

Seperti kata pepatah bahwa “*tidak ada gading yang tidak retak*” dan dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan (baik dari isi maupun penyajiannya).Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal skripsi ini.Akhirnya penulis bersama semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan proposal skripsi ini berharap semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.Amin.

Malang, Febuari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Bank Perkreditan Rakyat.....	12
2.1.1. Definisi Bank Perkreditan Rakyat	12
2.1.2. Pengaturan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat.....	13
2.1.3. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.....	13
2.1.4. Sumber Dana Bank Perkreditan Rakyat	14
2.2 Kredit	14
2.2.1. Definisi Kredit	14
2.2.2. Fungsi Kredit	15
2.2.3. Unsur Kredit	17
2.2.4. Bentuk Jaminan Kredit.....	23
2.2.5. Prinsip Pemberian Kredit.....	25
2.3 Konsep Resiko	26
2.3.1. Resiko Usaha Bank	26
2.3.2. Manajemen Resiko Perbankan.....	28
2.3.3. Penerapan Manajemen Resiko Perbankan....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Non Performing Loan (NPL).....	29
2.4.1. Definisi Non Performing Loan	29
2.4.2. Penyebab Kredit Bermasalah	Error! Bookmark not defined.
2.4.3. Tingkat Kolektibilitas yang Ditetapkan Oleh Bank Indonesia.....	36
2.4.4. Penyisihan Penghapusan Aktiva	38
2.4.5. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	39
2.5 Profitabilitas	41
2.5.1. Modal Bank	41

2.5.2.	Asset Bank	44
2.5.3.	Return On Asset (ROA)	44
2.6	Modal Sosial	45
2.6.1.	Definisi Modal Sosial	45
2.6.2.	Unsur Modal Sosial	48
2.6.3.	Pengendalian Kredit Melalui Modal Sosial	Error! Bookmark not defined.
2.7	Penelitian Terdahulu	56
2.8	Kerangka Pikir.....	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		62
3.1	Pendekatan Penelitian	62
3.2	Fokus Penelitian dan Unit Analisis	63
3.3	Sumber Data.....	64
3.4	Informan Penelitian	65
3.5	Teknik Pengumpulan Data	67
3.6	Teknik Analisis Data.....	68
3.7	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		73
4.1	Gambaran Informan Penelitian.....	73
4.2	Implementasi Modal Sosial Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah.....	75
4.2.1.	Unsur Partisipasi Dalam Jaringan Dan Tindakan Yang Proaktif	77
4.2.2.	Unsur Norma Dan Nilai Sosial.....	80
4.2.3.	Unsur Resiprocity.....	81
4.2.4.	Unsur Trust.....	82
4.3	Dampak Kredit Bermasalah Bagi BPR XYZ Cabang Kepanjen	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		88
5.1	Kesimpulan.....	88
5.2	Saran.....	89
Daftar Pustaka		91
Lampiran		94

Daftar Tabel

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	56
Tabel 3.1: Unit Analisis Penelitian.....	63
Tabel 4.1: Jenis Kelamin Informan Penelitian (dalam persentase).....	73
Tabel 4.2: Tingkat Pendidikan Informan Penelitian (dalam persentase).....	74
Tabel 4.3: Lama Menjadi Nasabah dan Pegawai Bank Syariah (dalam persentase).....	74



Daftar Gambar

Gambar 1.1 : Kurva Pergerakan NPL BPR XYZ tahun 2014-2017.....	9
Gambar 2.1: Kerangka Pikir.....	61
Gambar 3.1 : Langkah-langkah Analisis Data	70





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modal dalam arti luas memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurut Abbas (2010), mengacu pada man Dixon *et al.* (1977) dan World Bank (2001), modal dalam arti luas, meliputi modal fisik (*physical capital*), modal manusia (*human capital*) dan modal alam (*natural capital*). Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai sangat tergantung kepada peningkatan pembentukan modal dalam arti luas, baik pembentukan modal fisik, modal manusia maupun modal alam. World Bank dalam Abbas (2010) menyatakan bahwa modal fisik, modal manusia dan modal alam merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan. Lebih lanjut, pembangunan akan terdorong dan berkelanjutan, bila modal per kapita dalam arti luas dapat meningkat dalam jangka panjang. Peningkatan modal per kapita dapat terjadi bila modal fisik dan modal manusia dapat meningkat dengan tetap menjaga kelestarian modal alam. Hal ini berarti pembangunan akan berkelanjutan bila eksploitasi modal alam dapat diminimalkan sambil meningkatkan pertumbuhan modal fisik dan modal manusia. Modal fisik dan modal manusia memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Keduanya dapat saling melengkapi, dimana kemajuan dalam modal fisik dapat saja melimpah pada modal manusia dan sebaliknya, kemajuan dalam modal manusia dapat pula melimpah pada modal fisik. Menurut World Bank dalam Abbas (2010), kemajuan dalam modal manusia dapat meningkatkan produktivitas dan tingkat pengembalian modal fisik.

Pada kenyataannya sebagaimana yang sering dikemukakan bahwa upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada kehadiran dari

modal keuangan, modal sumberdaya manusia, modal alam, maupun inovasi teknologi. Kehadiran variabel tersebut yang diyakini sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas. Tingginya tingkat produktivitas usaha sering dijadikan dasar interpretasi dari kemampuan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya. Dengan terfokusnya faktor tersebut sebagai indikator input untuk menghasilkan suatu produk tertentu sering mengabaikan variabel modal sosial sebagai input yang sesungguhnya sangat berperan secara ekonomi untuk meningkatkan produktivitas usaha dan efisiensi (Coleman, dalam Yuliarmi, 2011).

Bordieu mengatakan ada 3 macam modal, yaitu modal uang, modal sosial dan modal budaya, dan lebih efektif digunakan jika diantara ketiganya ada interaksi sosial atau hubungan sosial. Modal sosial dapat digunakan untuk segala kepentingan namun tanpa ada sumber daya fisik dan pengetahuan budaya yang dimiliki maka sulit dibagi individu-individu untuk membangun sebuah hubungan sosial. Hubungan sosial hanya akan kuat jika ketiga unsur diatas eksis (Jousairi, 2006). Selanjutnya Jousairi (2006) menjelaskan unsur-unsur pokok dalam modal sosial meliputi: Partisipasi Dalam Suatu Jaringan; *Resiprocity*; *Trust*; Norma Sosial; Nilai-nilai; serta Tindakan yang Proaktif.

Modal sosial tumbuh didalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya. Didalam proses perubahan dan upaya mencapai tujuan tersebut masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang dipedominasi sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan atau membangun jaringan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan roh modal sosial antara lain: sikap yang partisipatif, sikap yang saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya. Modal sosial

menjadi perekat bagi setiap individu dalam bentuk norma kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif (Kadarisman Y., 2015).

Dalam Modal Sosial dikenal dua tipologi modal sosial yakni: (1) Modal Sosial Terikat (*Bonding Social Capital*) dan, (2) Modal Sosial yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*). Ciri khas dari modal sosial terikat yakni anggota kelompok maupun kelompok dalam konteks ide, relasi dan perhatian lebih berorientasi kedalam (*inward looking*), dengan ragam masyarakat yang homogenius. Fokus perhatiannya adalah menjaga nilai-nilai yang turun temurun telah diakui dan dijalankan sebagai bagian dari tata perilaku dan perilaku moral dari entitas sosial tersebut, umumnya mereka konservatif. Sedangkan modal sosial yang menjembatani menggunakan prinsip-prinsip yang universal mengenai (a) *persamaan*, yakni bahwa setiap anggota kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama, (b) *kebebasan*, yakni setiap anggota kelompok bebas berbicara, bebas mengemukakan pendapat atau ide-ide, sehingga memberikan kontribusi terhadap perkembangan organisasi, (c) *kemajemukan dan humanitarian* yakni nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan kelompok atau *group*. Kemajemukan disini membangun kesadaran bahwa hidup dengan beragam suku, ras, budaya dan cara berfikir yang berbeda adalah hal yang logis, biasanya kelompok ini memiliki sikap dan pandangan terbuka dan mengikuti perkembangan dunia diluar kelompoknya (*outward looking*). Kedua tipologi ini perlu dipahami oleh seorang manajer yang akan membawahi suatu kelompok yang akan dipimpinnya, sehingga kebijakan dalam pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan perannya sebagai atasan akan tepat mengenai sasaran (Jousairi, 2006).

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi baik secara individual maupun kelompok. Interaksi sosial itu dapat terjadi melalui proses-proses sugesti, identifikasi, simpati, dan imitasi (Supardan, 2007: 151). Proses yang terus-menerus akan melahirkan suatu keterlekatan. Sedangkan keterlekatan merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat (*embedded*) dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung diantara para aktor (Damsar, 2009). Sedangkan pengertian jaringan yaitu ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial) (Damsar, 2009). Relasi-relasi sosial yang terbentuk ketika individu-individu berupaya menggunakan sumber-sumber individual mereka sebaik-baiknya tidak hanya penting dilihat sebagai komponen-komponen struktur sosial. Relasi-relasi sosial tersebut juga dapat dilihat sebagai sumber-sumber untuk individu tersebut (Coleman, 2008). Hal inilah yang disebut Coleman sebagai “modal sosial” yakni kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi (Coleman, 2008).

Mengacu pada pengertian keterlekatan, maka adanya perjanjian kredit yang terjalin antara nasabah dan Badan Perkreditan Rakyat akan melekat dalam jaringan. Saat membentuk interaksi-interaksi ini, modal sosial mempengaruhi perilaku individu dan akhirnya merubah sistem ekonomi. Menurut Musselman dan Jackson (dalam Wiriadisastra, 1992) “kredit adalah kemampuan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan pertukaran suatu janji untuk membayar kemudian”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan, yaitu pihak kreditur percaya kepada keinginan dan kemampuan dari debitur untuk memenuhi janji akan membayar, oleh karena itu kreditur

bersedia memberikan barang, jasa dan uang. Sedangkan dari pihak debitur berarti menerima kepercayaan, yaitu berkewajiban untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit berasal dari Bahasa Yunani *credere/creditum* yang artinya percaya atau kepercayaan (Ratnasari, 2014). Dapat dikatakan bahwa kredit berkaitan dengan dua hal yaitu masa pada saat diberikan (masa sekarang) dan masa pada saat mengembalikan (masa yang akan datang). Dalam Bank Perkreditan Rakyat, kredit yang diberikan kepada nasabah adalah berupa uang yang digunakan untuk pengembangan usaha maupun kebutuhan lain yang bersifat positif.

Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan salah satu dari lima kelompok lembaga perbankan di Indonesia dimulai sejak setelah kemerdekaan. Pada waktu itu pemerintah mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank tersebut kemudian berdasarkan Paket Oktober 1988, yang lebih dikenal dengan sebutan Pakto 1988, dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (Wijaya, 2011).

Salah satu fungsi utama bank yaitu memberikan kredit kepada nasabahnya dapat berbentuk kredit modal kerja maupun kredit investasi. Kelancaran pemberian kredit sangat bergantung kepada peranan bank itu sendiri dan kesadaran pihak nasabah untuk menyelesaikan kredit sebagaimana yang telah disepakati. Dalam memberikan kredit tersebut, hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah atau dengan kata lain nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Terjadinya kredit bermasalah dapat diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya: nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, atau hal tersebut dapat juga diakibatkan karena nasabah tidak sengaja misalnya,

akibat terjadinya bencana alam. Oleh karena itu, setiap bank harus mengendalikan kreditnya dengan baik dan melakukan penanggulangan atau penyelesaian terhadap kredit yang digolongkan bermasalah.

Menurut Suyatno (2003:14) ada 4 (empat) unsur yang terdapat dalam hal perkreditan, antara lain sebagai berikut: Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai suatu akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hal baru di masa depan, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan, inilah yang menyebabkan unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. Prestasi atau objek kredit, tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas kredit bermasalah salah satunya dilakukan oleh Munte M.H.M., dan Santi P.S (2014) yang berjudul Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha jasa perbankan yang

memberikan pelayanan jasa pada nasabah dalam bentuk pemberian kredit. Dengan naiknya jumlah kredit akan diikuti pula oleh kemungkinan tidak tertagihnya kredit dan yang terjatuh ke dalam kredit bermasalah. PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan mengalami peningkatan kredit bermasalah yaitu kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kredit Kurang lancar, Diragukan, dan Macet yang dibandingkan dari 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 jumlahnya sebesar Rp.175.599.000, tahun 2012 sebesar Rp. 175.620.000, dan tahun 2013 sebesar Rp. 357.973.000. Pemicu utama kredit bermasalah pada PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan pada tahun 2013 adalah pergerakan harga jual komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan pihak bank mengambil beberapa alternatif penyelesaian kredit bermasalah yaitu secara damai dan jalur hukum, dan untuk kategori kredit yang tergolong macet, apabila kreditnya masih dapat diselamatkan maka pihak bank mengambil alternatif penyelesaian kredit dengan beberapa cara yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Pengawasan kredit pada bank tergolong sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari sistem dan prosedur kredit yang dijalankan oleh pihak bank. Hal lain yang menyebabkan kredit bermasalah juga dikarenakan kelalaian petugas bank dalam menilai karakter dan nilai jaminan nasabah.

Wilamarta M., dan Zulfadli B (2012) meneliti manfaat yuridis dan sosiologis yang bersifat komplementer dalam perjanjian kredit untuk meminimalisir resiko bank sebagai kreditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis jasa perbankan khususnya pemberian kredit, dibangun diatas kepercayaan antara bank dengan debitor adalah sesuatu yang rentan karena tidak ada seorang pun atau satu cara pun yang dengan pasti dapat mencegah debitor melakukan wanprestasi. Debitor yang tidak mau memenuhi kewajibannya dapat disebabkan karena dari semula memang ada itikad tidak baik (sejak

semula sulit diprediksi) dan atau karena melakukan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dana pinjaman. Yang menjadi masalah bagi bank meski debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya, bank tetap harus melaksanakan kewajibannya terhadap kreditor (penabung) yang tidak mau tahu adanya kredit macet tersebut. Itu sebabnya bank terpaksa melakukan 2 (dua) macam strategi, yaitu: penyelamatan kredit (menggunakan analisis sosiologis) dan penyelesaian kredit (menggunakan analisis yuridis).

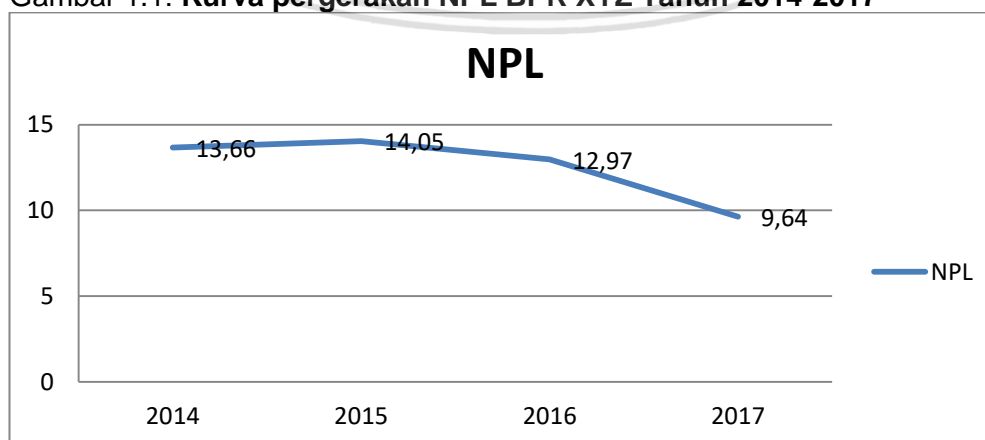
Peran modal sosial pada kontrak pinjaman pernah diteliti oleh Hidayati (2014) dengan judul Peran Modal Sosial Pada Kontrak Pinjaman Bank Thithil dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Usaha (Studi pada Pasar Blimbing Kota Malang). Pandangan neoklasik menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi saja. Namun teori tersebut tidak dapat menjawab tindakan kontrak pinjaman pedagang dan Bank Thithil. Sehingga dipatahkan oleh teori kelembagaan yang mengaitkan struktur sosial dalam memahami suatu tindakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kelembagaan melalui modal sosial untuk menjawab interaksi kontrak pinjaman Bank Thithil serta implikasinya terhadap keberlangsungan usaha pedagang di Pasar Blimbing Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial berperan untuk membuat pedagang memilih Bank Thithil daripada formal. Dilihat dari jaringan, hubungan personal membuat pedagang merasa nyaman meminjam di Bank Thithil. Selain itu untuk menjaga jaringan, Bank Thithil berusaha melayani tidak dalam bentuk uang saja, tetapi juga menyediakan dalam bentuk barang yang disebut sebagai Bank Perkakas. Kemudian *trust* dibentuk dari rasa saling percaya. Sehingga walaupun tidak bisa membayar maka dapat dilakukan negosiasi. Disisi lain norma yang telah disepakati dan nilai positif yang dibentuk Bank Thithil menjadikan pedagang tidak berpindah ke lembaga formal. Sedangkan implikasinya terhadap keberlangsungan usaha pedagang

dapat menguntungkan dan merugikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Pengurangan risiko kredit macet dapat diupayakan dengan meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet. Bank harus senantiasa menggunakan analisa kredit yang benar dalam pemberian kredit kepada nasabah untuk mengurangi resiko adanya kredit macet. Pada dasarnya kredit macet yang dihadapi bank-bank saat ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai “konsep 5 C’s” yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition* yang kesemuanya itu dapat memberikan sebagai dasar penilaian kepada seorang debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak (Usaman, 2003).

Secara kriteria ekonomi atas dasar kepercayaan maka suatu kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara produktif, saling menguntungkan dan meminimalkan adanya moral hazard yang berpotensi timbul dikemudian hari atas suatu perjanjian kerjasama. Kasus kredit macet yang dialami oleh BPR XYZ di Kota Malang, terjadinya kredit macet tidak selalu disebabkan oleh wanprestasi dari sisi debitur namun juga turut andil sisi kreditur itu sendiri. Namun karena adanya modal sosial, kredit bermasalah yang ada dapat diminimalkan dari tahun ke tahun. Berikut adalah gambaran data NPL BPR XYZ selama 4 tahun terakhir.

Gambar 1.1: **Kurva pergerakan NPL BPR XYZ Tahun 2014-2017**



Sumber : BPR XYZ Kabupaten Malang

Peneliti ingin mendeskripsikan dengan menggali info atas kejadian tersebut pada kedua belah pihak. Sehingga bisa dilakukan penilaian secara obyektif mengenai penyebab kredit macet serta penanggulangan kredit macet dan antisipasi dini yang dilakukan hingga bisa menurunkan angka kredit bermasalah. Berdasarkan uraian latar belakang, teori dan penelitian terdahulu diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang peran modal sosial dalam mengatasi kredit bermasalah pada BPR XYZ Cabang Kota Malang. Penelitian ini berjudul **“Implementasi Modal Sosial Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada BPR XYZ Cabang Kepanjen)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimana unsur-unsur modal sosial menyelesaikan kredit macet pada BPR XYZ Cabang Kepanjen?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya mengatasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh BPR XYZ Cabang Kepanjen dengan mengimplementasikan unsur-unsur yang terdapat pada modal sosial.

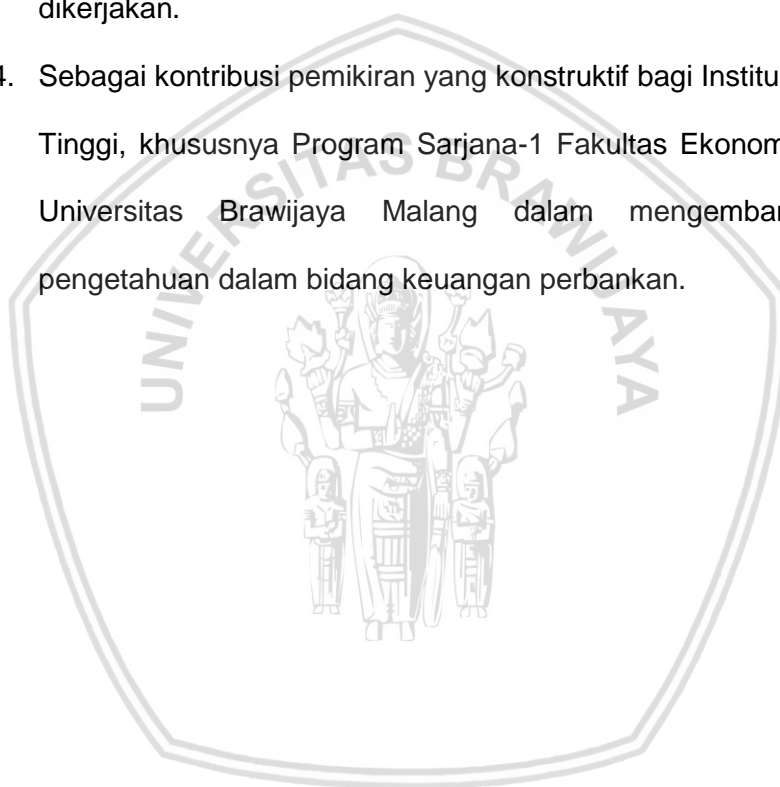
1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dicapainya tujuan penelitian ini, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis dapat memberikan wawasan bagi penulis dan bagi kalangan akademisi, terutama mengenai peran modal sosial dalam

mengatasi kredit bermasalah pada BPR khususnya BPR XYZ Cabang Kepanjen.

2. Secara praktis dapat di ketahui akar permasalahan terjadinya kredit macet dan dampak terhadap perusahaan serta bagaimana cara penanggulangan yang dirasa paling efektif.
3. Bagi peneliti selanjutnya dengan bidang yang sama dapat digunakan sebagai referensi/ sumbangan pemikiran bagi penelitian yang dikerjakan.
4. Sebagai kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi Institusi Perguruan Tinggi, khususnya Program Sarjana-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan perbankan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Perkreditan Rakyat

2.1.1. Definisi Bank Perkreditan Rakyat

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Bank merupakan sektor penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Selain itu, bank juga merupakan lembaga yang berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran, serta berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukannya.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk –bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan jenisnya, bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dimana bank perkreditan rakyat adalah bank yang memberikan simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia.

2.1.2. Pengaturan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Bank Indonesia yang tertuang dalam UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberi izin (*right to lincense*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

Pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional Bank Perkreditan Rakyat namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) agar tercipta sistem perbankan yang sehat.

2.1.3. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Usaha BPR yang diperbolehkan menurut undang-undang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanandeposito berjangka, tabungan atau dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh BPR antara lain:

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro.

- b. Melakukan penyertaan modal.
- c. Melakukan usaha perasuransian.
- d. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana disebut diatas.

2.1.4. Sumber Dana Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Kasmir (2000;45) sumber dana bank atau dari mana bank mendapatkan dana untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi 3 sumber, yaitu dana yang berasal dari modal sendiri, pinjaman dan masyarakat.

1. Dana yang berasal dari modal sendiri Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak pertama yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun sumber lain.
2. Dana yang berasal dari pinjaman Sumber dana ini sering disebut dana pihak kedua yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.
3. Dana yang berasal dari masyarakat Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

2.2 Kredit

2.2.1. Definisi Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, "*Credere*", yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah (debitur) yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah (debitur) adalah kepercayaan.

Menurut Taswan, Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara bank dengan debitur (nasabah).

2.2.2. Fungsi Kredit

Suatu kredit dapat dikatakan baik apabila ia dapat bermanfaat bagi debitur secara tepat guna sehingga dapat memajukan usaha debitur yang berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan debitur tersebut. Tepat guna di sini dapat diartikan bahwa jumlah nominal plafond kredit yang diterima oleh debitur adalah sesuai kebutuhannya, karena apabila jumlah nominal plafond yang diterima tidak mencukupi kebutuhannya maka debitur tidak dapat meningkatkan perputaran usaha sesuai tujuannya pada waktu mengajukan permohonan kredit. Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi, dan jasa yang semuanya itu ditujukan

untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Berikut ada beberapa fungsi kredit (Suyatno, 2007) yang dilihat secara luas antara lain:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit, maka dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh pihak yang menerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Untuk meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga suatu daerah yang kekurangan uang memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya bertambah, atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan.

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

e. Meningkatkan kegairahan usaha

Bagi pihak yang menerima kredit, tentu akan dapat meningkatkan kegairahan dalam melakukan usahanya, apalagi bagi nasabah yang memegang modal usahanya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit, maka nasabah akan bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula untuk mengurangi pengangguran.

g. Meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional, akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara pihak yang menerima kredit dengan pihak yang memberi kredit, sehingga terjalin hubungan yang baik dalam hubungan multinasional.

Menurut Hasibuan (2004), fungsi kredit bagi masyarakat adalah untuk: (1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang; (2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang; (3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang; (4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi; (5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha; (6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan; (7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.2.3. Unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan bank sebagai kreditur terhadap nasabah (peminjam)

sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Suyatno dalam Hermansyah (2005), mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau objek kredit, dalam hal ini tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka

transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Berdasarkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana disebut di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafond kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *letter of credit* (L/C).
- 2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit.
- 3) Adanya kewajiban melunasi utang Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. Dengan demikian, kredit

perbankan bukan suatu bantuan dana bank yang diberikan secara cuma-cuma. Kredit perbankan adalah suatu utang yang harus dibayar kembali oleh debitur.

- 4) Adanya jangka waktu tertentu Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit.
- 5) Adanya pemberian bunga kredit Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur, namun sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur. Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan pembayarannya oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

Sedangkan menurut Rivai dan Andria (2006) unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit adalah sebagai berikut :

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa insturmen (*credit instrument*).

4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan *unsure essensial* kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Resiko di pihak pemberi kredit adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko di pihak nasabah adalah kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.
7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (*prestasi*) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), *risk premium*, dan sebagainya. Jika *credit rating* penerima kredit tinggi, *risk premium* dapat dikurangi dengan *safety discount*.

Dari beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa unsur minimal yang harus terdapat di dalam kredit antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan di sini harus berasal dari kedua belah pihak, baik kepercayaan dari kreditor selaku pemberi kredit maupun kepercayaan dari debitur selaku penerima fasilitas kredit. Kreditor percaya bahwa debitur memiliki

kemampuan untuk mengangsur dan akan mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kepercayaan debitur kepada kreditur adalah keyakinan debitur terhadap bank yang bersangkutan bahwa bank sebagai kreditur memiliki pendanaan yang kuat serta manajemen yang baik sehingga bank akan menyimpan dengan baik dokumen jaminan kredit yang ada dan tidak akan menyalahgunakan dokumen tersebut.

2. Resiko

Dalam setiap pemberian kredit selalu terdapat dua kemungkinan bahwa kredit akan terselesaikan dengan baik maupun bermasalah, serta kemungkinan tidak terselesaikannya kredit. Di sini resiko yang paling tidak diinginkan adalah adanya gagal bayar dari debitur di mana debitur tidak sanggup mengembalikan jumlah fasilitas kredit yang telah diterimanya. Sedangkan dari sisi kreditur pun terdapat resiko apabila kreditur mengalami pailit maka debitur akan susah untuk mengambil dokumen jaminan kredit yang telah diserahkan kepada bank.

3. Jangka Waktu

Adanya jangka waktu ini harus disebutkan secara jelas dalam perjanjian kredit yang bersangkutan, hal ini yang nantinya akan berkaitan dengan proses eksekusi apabila dengan berakhirnya jangka waktu fasilitas kredit debitur belum dapat melunasi pinjaman yang telah diterimanya. Semakin panjang jangka waktu yang ada pada suatu kredit, semakin besar pula resiko yang terkandung di dalam kredit tersebut.

4. Bunga

Bunga kredit yang ditetapkan oleh bank dalam perjanjian kredit menjadi acuan besarnya angsuran kredit yang harus dibayar oleh debitur setiap bulannya. Bunga kredit tersebut berfungsi sebagai imbalan terhadap

masyarakat (nasabah) yang telah mempercayakan uangnya di bank dalam bentuk simpanan, baik berupa tabungan maupun deposito.

2.2.4. Bentuk Jaminan Kredit

Jaminan kredit adalah suatu hal yang amat penting dalam memberikan kredit pada calon debitur karena merupakan jaminan keamanan atas kredit yang diberikan. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Selain itu, jaminan harus jelas dan diikat secara yuridis, dalam hal ini peran seorang analis kredit sangat penting, sebab mereka lah yang menentukan wajar tidaknya sebuah jaminan kredit. Adapun syarat-syarat jaminan kredit yaitu:

- a. Secara umum syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi dari jaminan kredit antara lain
 1. Mempunyai nilai ekonomis secara umum dan jelas.
 2. Nilai jaminan harus lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan.
 3. Barang jaminan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya.
 4. Nilai barang jaminan tersebut harus konstan dan akan lebih baik kalau nilainya bisa mengalami kenaikan dikemudian hari.

5. Kondisi barang tersebut dalam keadaan baik dan lokasinya cukup strategis.
 6. Secara fisik barang jaminan tersebut tidak cepat rusak, usang dan lain-lain sebab akan mengurangi nilai ekonomis.
 7. Barang jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lebih lama dari jangka waktu kredit yang akan dijaminkan.
- b. Sedangkan syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi oleh suatu barang jaminan adalah:
1. Merupakan milik nasabah bersangkutan.
 2. Ada dalam kekuasaan calon debitur sendiri.
 3. Tidak berada dalam persengketaan dengan pihak lain.
 4. Memiliki bukti-bukti kepemilikan atau sertifikat atas nama nasabah yang masih berlaku dan sah.

Adapun bentuk jaminan yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang disalurkan yaitu:

a. Jaminan kebendaan

Jaminan benda tidak bergerak, meliputi tanah, mesin, kapal laut, bangunan rumah dan lain-lain. Jaminan benda bergerak, meliputi kendaraan bermotor, mesin dan peralatan kantor, persediaan bahan baku dan barang jadi, perhiasan dan lain sebagainya. Jaminan benda tidak bergerak adalah surat wesel, promes, sertifikat deposito, piutang dagang, sertifikat obligasi, dan surat berharga lainnya.

b. Jaminan pihak ketiga

Jaminan pihak ketiga atau perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dan ini dilakukan apabila bank merasa jaminan kebendaan

yang disediakan debitur kurang memadai, biasanya bank meminta pihak ketiga yang ditunjuk debitur dan dapat diterima bank.

2.2.5. Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2000) jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Dalam menyalurkan kredit, bank tetap berjalan pada prinsip kehati-hatian. Selain berpatokan kepada 5-C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*), prinsip 4-P (*personality, party, perpose, prospect, payment*), dan prinsip 3-R (*return, repayment, risk bearing ability*), (Hariyani, 2010). Kelayakan badan usaha atau seseorang penerima kredit berdasarkan pedoman 5-C adalah sebagai berikut: *Character* yaitu sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. *Capital* (pemodalannya) yaitu hal yang menjadi perhatian dari segi pemodalannya ini yaitu tentang besar modal dan struktur modal termasuk kinerja. *Capacity* (kemampuan) yaitu perhatian yang diberikan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan. *Collateral* (anggunan) yaitu kemampuan si calon debitur memberikan anggunan yang baik serta memiliki nilai

baik secara hukum maupun ekonomi. *Condition of economy* (kondisi perekonomian) yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah.

Kelayakan badan usaha atau seseorang penerima kredit berdasarkan pedoman 4-P adalah sebagai berikut: *Personality* atau kepribadian debitur merupakan segi subjektif namun penting dalam penentuan kredit. *Purpose* atau tujuan, yaitu menyangkut tujuan penggunaan kredit apakah digunakan untuk kegiatan konsumtif, produktif, atau kegiatan spekulatif. *Prospect* atau masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut. *Payment* atau pembayaran, hal yang menjadi perhatian misalnya mengenai kelancaran aliran dana (*cash flow*).

Kelayakan badan usaha atau seseorang penerima kredit berdasarkan pedoman 3-R adalah sebagai berikut: *Returns* atau balikan, yaitu hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan. *Risk bearing ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

2.3 Konsep Resiko

2.3.1. Resiko Usaha Bank

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Risiko yang dihadapi perbankan meliputi (Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003):

1. Risiko kredit: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya.

2. Risiko pasar: risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar meliputi suku bunga dan nilai tukar.
3. Risiko likuiditas: risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
4. Risiko operasional: risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko hukum: risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6. Risiko reputasi: risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko strategik: risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko kepatuhan: risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Risiko kredit merupakan risiko debitur tidak dapat dan tidak mau membayar kembali hutang dan bunga yang merupakan kewajibannya. Bank sangat memperhatikan risikoini, mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya. Sampai saat ini, sejarah menunjukkan

bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugiannya yang ditimbulkan sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat.

2.3.2. Manajemen Resiko Perbankan

Perbankan Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia, yang merupakan bank sentral Indonesia. Secara umum, Bank Indonesia mempunyai tujuan mempertahankan rupiah untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Menjaga dan mempertahankan sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi perbankan

Manajemen risiko perbankan diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) 5/8/PBI/2003 yaitu mengenai pelaksanaan manajemen risiko Bank. Bank diharuskan mengelola risiko perbankan melalui kegiatan:

1. Identifikasi Risiko
2. Pengukuran Risiko
3. Monitoring Risiko
4. Pengendalian Risiko

Bank Indonesia diharuskan mengelola risiko secara terintegrasi dan membuat sistem, struktur manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mengelola empat risiko berikut ini (Hanafi, 2009).

1. Risiko Pasar, risiko karena harga pasar yang bergerak ke arah yang tidak menguntungkan.
2. Risiko Kredit, risiko karena *counterparty* mengalami gagal bayar (tidak bisa memenuhi kewajibannya).

3. Risiko Operasional, risiko yang terjadi karena proses internal yang gagal, tidak memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan masalah eksternal yang mempengaruhi operasi bank.
4. Risiko Likuiditas, risiko yang terjadi karena bank tidak bisa memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo.

2.3.3. Penerapan Manajemen Resiko Perbankan

Dalam pelaksanaan manajemen risiko perbankan ada empat pedoman umum yaitu (Hanafi, 2009):

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk organisasi dan fungsi manajemen risiko.
2. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan system informasi manajemen risiko, termasuk pengelolaan *asset and liabilities management* (ALMA).
4. Pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

2.4 Non Performing Loan (NPL)

2.4.1. Definisi Non Performing Loan

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak perbankan adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit bermasalah. Hal ini terutama disebabkan kegagalan nasabahnya dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Kredit yang bermasalah merupakan malapetaka bagi pihak bank, karena berhasil atau tidaknya bank tersebut dapat dilihat dari kinerja bank tersebut dalam melakukan aktivitasnya, seperti dalam pelayanan pemberian kredit. Selain itu, dampak dari

kredit bermasalah juga akan mempengaruhi laba yang akan diterima oleh bank, dalam hal ini memungkinkan laba yang didapat akan kecil apabila kredit yang diberikan suatu bank kepada nasabahnya akan mengalami permasalahan dalam pengembaliannya.

Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah merupakan risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Hampir semua perbankan memiliki kredit bermasalah, bahkan dalam beberapa kasus kredit bermasalah di Indonesia berakhir kepada penutupan beberapa bank. Sebagai lembaga bisnis dan keuangan, dalam lingkup yang luas perbankan harus dapat meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tetap terjaga.

Non performing loans (NPL) merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. NPL adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Hariyani, 2010).

Menurut Hermansyah: "Kredit Bermasalah atau *non performing loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya". Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), adalah kredit dimana terjadicidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diusaha debitur sehingga memiliki kemungkinantimbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas (Rivai

2006). Berdasarkan Surat Edaran BI no. 7/10/DPNP, tanggal 31 Maret 2005 NPL dibedakan menjadi dua yaitu NPL Gross dan NPL Nett.

Menurut Dahlan Siamat, "Kredit bermasalah atau *problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur." Menurut Ismail, "Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah."

Oleh karena banyaknya definisi kredit bermasalah, maka kebanyakan diantara kita yang mengartikan kredit bermasalah itu sama dengan kredit macet, yang dalam arti sebenarnya, kedua persepsi tersebut adalah berbeda. Setiap kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu kredit macet. Karena mungkin saja kredit tersebut bermasalah, tetapi sama sekali belum macet. Kredit bermasalah masih bisa diselesaikan jika ditangani dengan baik dan tepat oleh petugas atau pejabat bank yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kredit bermasalah sangat memerlukan perhatian khusus dari pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur.

Secara akuntansi perbankan, kredit non perform berdampak kepada biaya yang harus dikeluarkan bank sehingga bank kehilangan sebagian keuntungan atau laba (Pasha, 2007). Untuk mengkompensasi kehilangan sebagian keuntungannya tersebut bank akan meningkatkan beban bunga kredit. Biaya-biaya yang timbul adalah biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang kemudian akan diikuti dengan meningkatnya biaya administrasi, biaya tenaga kerja, dan biaya litigasi dan reputasi.

2.4.2. Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah akan menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Jika tidak ditangani secara baik, maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat berpotensi bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah seperti:

1. Faktor internal perbankan

Faktor internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank, dalam hal ini faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah adalah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri, seperti:

a. Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah.

Setiap analisis kredit harus berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat. Biasanya para analis sebelum melakukan analisis, meminta data perkembangan usaha kepada calon nasabah. Namun dalam kenyataannya sangat banyak data yang diberikan oleh calon nasabah tersebut merupakan data yang direkayasa, sehingga hasil analisis terhadap kredit pun dapat membahayakan kelancaran pengembalian kredit tersebut.

b. Analisis tidak cermat

Petugas analisis kredit kurang mengamati angka-angka data atau informasi tentang usaha nasabah. Mungkin analis kredit tersebut terlalu percaya dengan apa yang disajikan oleh nasabah, atau mungkin saja kurang cermat dalam melakukan analisis dari data atau informasi yang diberikan oleh calon peminjam, sehingga terjadi kesalahan pada saat memberikan keputusan kelayakan kredit.

c. Kurangnya akuntabilitas putusan kredit

Kurangnya pertanggungjawaban dari petugas analis kredit dan pejabat bank sehingga ada kesan tidak bersungguh-sungguh dalam menerima tugas dan wewenang yang diterimanya.

d. Bank kurang dalam pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara teratur.

Setiap usaha tentu ada risiko bisnis dan risiko non bisnis. Oleh karena itu bank harus mengetahui persis setiap perkembangan usaha nasabahnya. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan baik secara periodik maupun secara insidental agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini.

e. Bank terlalu berkompromi

Dalam pemberian kredit bank memang seharusnya bersikap luwes, namun tidak semua masalah bisa dikompromikan. Tidak jarang petugas bank terlalu banyak memberikan kemudahan, sehingga memberikan kelonggaran yang sangat prinsip, seperti persyaratan yang terlalu ringan.

f. Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat

Setiap bank tentunya harus mempunyai kebijakan perkreditan yang matang dalam menjalankan usaha perbankannya. Dalam kebijakan tersebut dengan tegas dan jelas digariskan beberapa ketentuan. Jika ketentuan tersebut terlalu longgar, maka member peluang pada pemberian kredit yang tidak sehat.

2. Faktor internal nasabah

a. Nasabah tidak memiliki itikad baik

Adanya niat yang buruk yang dilakukan nasabah kepada bank serta tidak ada rasa ingin dalam melaksanakan kewajibannya. Nasabah seperti ini tidak bisa ditolerir karena memang memiliki karakter yang sangat buruk.

b. Nasabah menghilang

Menghilangnya nasabah sudah dipastikan akan membuat kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu, keberadaan tetap dan seluk beluk nasabah sangat perlu diperhatikan.

c. Terganggunya kelancaran usaha nasabah

Salah satu penyebab bermasalahnya kredit nasabah yaitu tidak mempunya melakukan kewajibannya kepada bank yang dikarenakan kelancaran usaha nasabah terganggu. Maka dalam hal ini sangat diperlukan data perkembangan nasabah.

d. Penyimpangan penggunaan kredit

Setiap nasabah sebelum direalisir dicantumkan dengan jelas dalam akad kredit tujuan penggunaannya. Jika terjadi penyimpangan dalam realisasinya, maka perlu diwaspadai akan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

e. Nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar

Oleh karena nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar, yang menjadikan dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

f. Nasabah memiliki masalah dalam rumah tangga

Setiap kehidupan rumah tangga nasabah diharapkan mengalami ketenangan dan kedamaian agar bisnisnya juga berjalan dengan tenang dan damai. Tidak sedikit ditemukan bahwa pemicu kredit bermasalah adalah masalah yang terjadi didalam keluarga nasabah itu sendiri.

3. Faktor Eksternal

a. Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif

Adanya globalisasi ekonomi menyebabkan perdagangan antar Negara tidak lagi mengenal batas. Dengan kata lain barang produksi bebas masuk dan bersaing dengan produksi dalam negeri.

b. Perubahan kurs mata uang

Terjadinya perubahan kurs mata uang asing sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha nasabah. Dalam hal ini nilai rupiah jatuh dibandingkan dengan valuta asing, jika usaha tersebut menggunakan bahan mentah atau setengah jadi dari luar negeri.

c. Hubungan diplomatik dengan Negara lain

Jika terjadi ketidaklancaran hubungan ekonomi antar dua negara. Maka dapat dipastikan akan mengganggu kemajuan perdagangan, yang juga akan mengakibatkan dampak terhadap pendapatan pelaku usaha.

d. Faktor alam yang bersifat negatif

Faktor alam yang bersifat negatif misalnya akibat adanya bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan lain-lain.

e. Adanya gejolak sosial

Gejolak sosial misalnya kekerasan politik yang mengakibatkan berbagai musibah terhadap dunia bisnis dan perekonomian.

f. Peraturan pemerintah yang merugikan

Di Indonesia sering muncul berbagai regulasi dan umumnya regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat. Misalnya pemerintah bermaksud untuk melindungi para pedagang kecil dengan melarang atau membatasi jumlah supermarket di daerah tertentu. Jika supermarket tersebut adalah nasabah bank, maka berarti kredit yang diperolehnya menjadi bermasalah.

2.4.3. Tingkat Kolektibilitas yang Ditetapkan Oleh Bank Indonesia

Tingkat kesehatan bank merupakan hal terpenting yang harus diusahakan oleh manajemen bank. Pengelola bank diharuskan memantau keadaan kualitas aktivaproduktif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatannya. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitasnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembalipokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, penggolongan kredit dibedakan menjadi:

1. Kolektibilitas kredit lancar
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai
2. Kolektibilitas kredit dalam perhatian khusus
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 3 bulan, atau
 - b. Kadang-kadang terjadi tunggakan
 - c. Mutasi rekening relatif aktif
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - e. Didukung dengan adanya pinjaman yang baru yang dilakukan nasabah
3. Kolektibilitas kredit kurang lancar
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 1 bulan, dan belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang

- masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan.
- b. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 3 bulan
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - e. Dokumen pinjaman yang lemah
4. Kolektibilitas kredit diragukan
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 6 bulan, dan belum melampaui 12 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan dan tidak lebih dari 2 bulan.
 - b. Kredit sudah jatuh tempo lebih dari 1 bulan dan tidak lebih dari 2 bulan
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 6 bulan
 - d. Kredit masih bisa diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang nasabah
 - e. Kredit masih bisa diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang nasabah
5. Kolektibilitas kredit macet
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan
 - b. Tidak memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan
 - c. Kredit sudah jatuh tempo melampaui 2 bulan
 - d. Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara

Manfaat dari kolektibilitas kredit (Hasibuan, 2005) adalah:

1. Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui perkembangan jumlah kredit lancar, cukup lancar, kurang lancar, dan tidak lancar.
3. Untuk mengetahui jumlah kredit yang produktif, cukup produktif, kurang produktif, dan tidak produktif.
4. Untuk meningkatkan pengawasan dan penagihan kredit.
5. Sebagai tolok ukur kemampuan analisis kredit, apakah mampu atau tidak. Jika sebagian besar yang disalurkan tergolong lancar atau cukup lancar berarti analisis kredit mampu. Sebaliknya, jika kredit yang tergolong kurang lancar atau malah tidak lancar berarti analisis kredit tidak mampu.
6. Sebagai tolok ukur baik atau tidaknya kebijaksanaan perkreditan yang dilakukan manajer bank bersangkutan.
7. Sebagai tolok ukur tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia.
8. Untuk mengetahui jumlah piutang yang akan dihapuskan.
9. Sebagai *tool of management* bagi manajer bank dalam perkreditannya.

2.4.4. Penyisihan Penghapusan Aktiva

Berdasarkan PBI no. 7/2/PBI/2005, perbankan nasional diwajibkan membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) kredit paling kurang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. PPA yang dibentuk untuk kredit berupa cadangan umum dan cadangan khusus, besarnya cadangan umum minimal 1% dari kredit dengan kualitas lancar, sedangkan besarnya cadangan khusus adalah:

- a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
- b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.

- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

2.4.5. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debiturnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Penyelesaian kredit merupakan usaha yang dilakukan bank dalam menanggulangi kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank harus membuat penggolongan kredit yang diberikannya berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Kolektibilitas kredit tersebut didasarkan pada faktor-faktor antara lain: ketepatan waktu, jumlah pembayaran pokok, dan bunga, jangka waktu sudah berakhir atau belum, hasil penilaian kemampuan dan kemauan debitur melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati.

Kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit bermasalah, sebelum dilakukan penanggulangan dapat ditempuh beberapa cara sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang tertunggak disamping usaha lain untuk melakukan penagihan. Peringatan tersebut dapat diulangi sampai tiga kali. Apabila debitur belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka bank dapat mencabut fasilitas kredit.
- b. Apabila setelah dilakukan peringatan tiga kali namun belum ada reaksi dan usaha debitur untuk melunasi hutangnya dapat ditempuh jalur hukum.

Beberapa cara pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan ulang)

“Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit”. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain misalnya : usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali, debitur menunjukkan itikad baik, dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berniat dan berminat untuk terus mengelola usahanya. Dalam proses *rescheduling* tunggakan pokok dan bunga dijumlahkan untuk kemudian dijadwalkan kembali pembayarannya dan untuk itu dibuat perjanjian *rescheduling* tersendiri.

2. *Reconditioning* (Persyaratan ulang)

“Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit”. Dalam *reconditioning* dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan.

3. *Restructuring* (Penataan ulang)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Tindakan ini meliputi:

1. Menambah jumlah kredit yang dikucurkan.
2. Menambah *equity*, seperti dengan menyetor uang tunai dan tambahan modal pemilik.
4. *Execution Collateral* (Eksekusi barang jaminan)

“Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang”. Pelaksanaan ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank usaha debitur sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Apabila hal ini terjadi bank menyarankan agar nasabah menjual jaminannya. Berdasarkan kesepakatan, kedua belah pihak mencari calon pembeli potensial. Harga penjualan pada dasarnya harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Apabila ternyata hasil penjualan tersebut berlebih, maka sisa hasil penjualan barang jaminan dapat dikembalikan kepada debitur. Namun, apabila harga penjualan tidak mencukupi menutup keseluruhan kewajiban debitur maka bank dapat menempuh dua kebijakan. Pertama, bank membebaskan atau menghapus bukukan sisa hutang. Kedua, sisa hutang debitur tetap dibukukan dengan harapan suatu ketika debitur dapat melunasi kembali kewajibannya.

2.5 Profitabilitas

2.5.1. Modal Bank

Modal merupakan faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrumen untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Sebagaimana perusahaan lainya, bank juga memiliki modal yang dapat digunakan untuk berbagai hal (seperti modal pelengkap),

modal yang dimiliki oleh bank sedikit berbeda dengan yang dimiliki perusahaan lainnya (Kasmir, 2000). Sedangkan menurut Bank Indonesia, penilaian pemodal dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal Bank dalam mengcover risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang.

Menurut Kasmir (2000;257) Modal bank pada umumnya terdiri dari dua macam yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti merupakan modal sendiri tertera dalam ekuitas. Sedangkan modal pelengkap merupakan modal pinjaman dan cadangan revaluasi aktiva serta cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

1. Modal inti, merupakan penjumlahan dari komponen berikut ini.
 - a. Modal disetor, Merupakan modal yang disetor secara efektif oleh pemilik bank, sesuai dengan peraturan berlaku.
 - b. Agio saham, Merupakan selisih lebih modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
 - c. Modal sumbangan, Modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, atau laba dari penjualan saham dari nilai yang tercatat.
 - d. Cadangan umum, Merupakan cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan setelah mendapat persetujuan dalam RUPS sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
 - e. Cadangan tujuan, Merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu.
 - f. Laba yang ditahan, Merupakan saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan.
 - g. Laba tahun lalu, Merupakan seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak.

- h. Rugi tahun lalu, Merupakan kerugian yang telah diderita pada tahun lalu.
- i. Laba tahun berjalan, Merupakan laba yang telah diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak.
- j. Rugi tahun berjalan, Merupakan rugi yang telah diderita dalam tahun buku yang sedang berjalan.

2. Modal pelengkap terdiri dari

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali dari aktiva tetap yang dimiliki bank.
- b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebankan laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterima seluruh atau sebagian aktiva produktif.
- c. Modal pinjaman, Merupakan pinjaman yang didukung oleh warkat-warkat yang memiliki sifat seperti modal. (maksimum 50% dari jumlah modal inti).
- d. Pinjaman subordinasi, Merupakan pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, memperoleh persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan perjanjian lainnya.

Besarnya kecukupan modal bank di seluruh bank yang ada di Indonesia telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan.

2.5.2. Asset Bank

Aktiva bank atau aset bank terdiri atas aktiva produktif dan aktiva non produktif. Aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, yaitu dalam bentuk, kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivative, penyertaan, transaksi rekening administrative, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan yang dimaksud aktiva nonproduktif adalah aset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Anggunan Yang Diambil Alih (AYDA), property terbengkalai (*abandoned property*), rekening antar kantor, dan *suspense account* (Hariyani, 2010;69).

Aset bank umum dapat dibagi menjadi empat kategori dasar: uang tunai, investasi dalam surat berharga, pinjaman yang diberikan, dan aset tetap. Persoalan manajemen aset berkisar sekitar alokasi dana di antara dan dalam ketiga kategori pertama; manajemen biasanya tidak terlibat dalam pekerjaan sehari-hari yang berkaitan dengan investasi dana dalam gedung dan perlengkapan. Tapi kalau pengeluaran tersebut direncanakan, persiapan harus dilakukan untuk menyediakan uang pada saat yang tepat.

2.5.3. Return On Asset (ROA)

ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba setelah pajak) yang dihasilkan dari total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Hariyani, 2010).

Beberapa keunggulan penggunaan rasio ini dalam pengukuran profitabilitas menurut Hakim (2006) dalam Galih (2011) adalah :

1. Return on assets merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio ini.
2. Return on assets mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.
3. Return on assets merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. Dengan semakin tingginya return on assets, maka hal tersebut menunjukkan bahwa bank telah meyalurkan kredit guna mendapatkan pendapatan. Dana – dana simpanan masyarakat yang berhasil dikumpulkan bank dapat mencapai 80%- 90% dari seluruh dana yang dikelola, sedangkan kredit yang disalurkan dapat mencapai 70%-80% dari kegiatan usaha bank.

ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar (Suad Husnan,1998) dalam Nusantara (2009).

2.6 Modal Sosial

2.6.1. Definisi Modal Sosial

Modal sosial memiliki cakupan dimensi yang sangat luas dan kompleks. Para ahli memberikan pengertian tentang modal sosial sangat bervariasi, sesuai

dengan sudut pandang serta dimensi yang dijadikan sebagai rujukan untuk memaknai modal sosial. Berbeda dengan modal manusia, yang lebih merujuk ke dimensi individu terkait dengan daya serta keahlian yang dimiliki seorang individu. Pada modal sosial lebih menekankan pada potensi individu maupun kelompok dan hubungan antar kelompok dalam suatu jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok.

Hughes dan Robert (2010), mengutip pendapat Inkpen dan Tsang (2005) tentang modal sosial. Modal sosial menampilkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari jaringan. Keuntungan ini dapat meliputi akses kepada pengetahuan, sumberdaya, teknologi, pasar, dan kesempatan bisnis. Sebuah ikatan jaringan seperti yang terbentuk dalam kontrak persediaan antara satu perusahaan dengan lainnya menciptakan sumberdaya modal sosial. Ketika interaksi di dalam hubungan antar perusahaan naik, modal sosial menjadi lebih baik, sehingga secara potensial meningkatkan keuntungan. Level kepercayaan dan ketergantungan rasional antara perusahaan dalam sebuah hubungan khusus adalah indikator kualitatif dimensi relasional. Kepercayaan satu perusahaan kepada lainnya menciptakan kepercayaan, dan seberapa besar perusahaan berpartisipasi aktif dalam hubungan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan (Hughes *et al.* 2007 dalam Hughes dan Robert, 2010).

Bourdieu dalam Adhikari (2009), mendefinisikan modal sosial sebagai kumpulan sumberdaya yang dibutuhkan oleh individual atau kelompok sehingga dapat memiliki jaringan hubungan institusional yang lebih tahan lama agar saling mengakui dan menghargai. Bourdieu (1986) menyatakan bahwa kekuatan dan konflik adalah elemen-elemen penting tentang hubungan sosial dan volume modal sosial yang dimiliki oleh agen tergantung kepada ukuran jaringan hubungan yang dapat dimobilisasi secara efektif. Definisi berpengaruh lainnya

tentang modal sosial menghubungkan modal sosial dalam menciptakan hasil pendidikan dan modal manusia (Coleman 1990 dalam Adhikari, 2009).

Menurut Putnam (1995) dalam Adhikari (2009), bahwa modal sosial mengacu kepada ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kinerja agar saling menguntungkan. Dia melihat modal sosial sebagai bentuk barang publik berbeda dengan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi dan politik pada level kolektif. Dia menekankan bahwa partisipasi orang-orang dalam kehidupan asosiasional menghasilkan institusi publik lebih efektif dan layanan lebih baik.

Modal sosial, dalam pengertian ekonomi terdiri dari *present value* dari hubungan aktor dengan aktor lain. Membangun hubungan dengan aktor lain membutuhkan *sunk investment* dalam hubungan sosial. Pertama, modal sosial adalah sebuah hubungan relasional, dimiliki bersama-sama oleh pihak yang melakukan hubungan. Tidak ada aktor yang mempunyai hak eksklusif terhadap modal sosial. Kedua, modal sosial berhubungan dengan *rate of return* dari fungsi produksi aktor. Melalui hubungan dengan kolega, teman dan klien datang kesempatan untuk mentransformasi keuangan dan modal manusia menjadi keuntungan (Burt 1992, dalam Furubotn dan Rudolf, 2005).

Didasarkan pada tulisan James Coleman, Fukuyama, Putnam dan lainnya, menyampaikan bahwa modal sosial, khususnya kepercayaan, berkembang melalui norma dan timbal balik serta kerjasama sukses dalam jaringan sipil. Kepercayaan memainkan peranan penting dalam mendorong kemakmuran ekonomi dan membuat demokrasi bekerja. Modal sosial adalah penting bagi kemakmuran, tetapi konsekuensi penting mungkin tidak dirasakan dalam ekonomi sebagaimana dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan cara yang sama, Putnam menyatakan bahwa untuk stabilitas politik, untuk efektivitas pemerintah dan bahkan untuk kemajuan ekonomi, modal sosial mungkin bahkan

lebih penting dibandingkan dengan modal fisik atau modal manusia (Fukuyama, 1995, Putnam, 1990 dalam Quigley, 1996).

Fukuyama (1995) dalam Quddus *et al.* (2000) menyatakan bahwa level kepercayaan yang melekat pada budaya nasional dapat berdampak kepada pengembangan ekonomi negara atau dengan menurunkan transaksi tinggi, di mana menghasilkan ekonomi lebih makmur dengan mendorong efisiensi pasar. Sebaliknya, level saling percaya lebih rendah atau modal sosial tidak memadai menyebabkan transaksi tinggi lebih tinggi dalam masyarakat, di mana membatasi aktivitas pasar dan membatasi perdagangan dalam sebuah masyarakat.

Kasus modal sosial yang bertumpu pada kepercayaan dan ekspektasi, seseorang yang dianggap jujur dan memiliki reputasi bagus akan lebih mudah memperoleh penghargaan dari pada individu yang tidak memiliki kredibilitas, misalnya dalam hal mendapatkan kredit. Dalam masyarakat tradisional, hubungan transaksi ekonomi yang selalu berulang dan menghasilkan pencapaian yang bagus, dalam jangka panjang mempunyai ekspektasi untuk bertahan ketimbang relasi ekonomi yang dipenuhi dengan manipulasi. Modal sosial dalam bentuk ekspektasi dan kepercayaan inilah yang bisa ditransformasikan menjadi keunggulan untuk memperoleh benefit ekonomi (Yustika, 2008).

2.6.2. Unsur Modal Sosial

Dalam modal sosial selalu tidak lepas pada 3 elemen pokok yang ada pada modal sosial yang mencakup:

- a. Kepercayaan/ *trust* (kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi dan kemurahan hati).
- b. Jaringan sosial/ *social networks* (partisipasi, resiprositas, solidaritas, kerjasama).

- c. Norma/*norms* (nilai-nilai bersama, norma dan sanksi, aturan-aturan).

Kepercayaan adalah unsur penting dalam modal sosial yang merupakan perekat bagi langgengnya hubungan dalam kelompok masyarakat. Dengan menjaga suatu kepercayaan, orang-orang bisa bekerja sama secara efektif. Social capital adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum didalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya.

Kepercayaan memiliki dampak positif terhadap efisiensi biaya-biaya transaksi, artinya antara pedagang dan pelanggan telah memiliki kepercayaan (saling mempercayai) satu sama lain. Adanya rasa kepercayaan akan membuat transaksi jualbeli terus berjalan sekalipun telah terjadi perjanjian hutang piutang dalam transaksi ekonomi tersebut. Kepercayaan akan menimbulkan kewajiban sosial dengan mempercayai seseorang akan menimbulkan kepercayaan kembali dari orang tersebut (resiprositas).

Dalam kaitannya dengan resiprositas dan pertukaran, Pretty dan Ward dalam (Badaruddin, 2005) mengemukakan bahwa adanya hubungan-hubungan yang dilandasi oleh prinsip resiprositas dan pertukaran akan menumbuhkan kepercayaan karena setiap pertukaran akan dibayar kembali (*repaid and balanced*). Hal ini merupakan pelicin dari suatu hubungan kerjasama yang telah dibangun agar tetap konsisten dan bersinambungan. Kepercayaan sosial hanya efektif dikembangkan melalui jalinan pola hubungan sosial resiprosikal atau timbal balik antar pihak yang terlibat dan berkelanjutan. Adanya *trust* menyebabkan mudah dibinanya kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), sehingga mendorong timbulnya hubungan resiprosikal. Hubungan resiprosikal menyebabkan social capital dapat melekat kuat dan bertahan lama. Karena diantara orang-orang yang melakukan hubungan tersebut mendapat keuntungan timbal balik dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Disini

hubungan telah memenuhi unsur keadilan (*fairness*) diantara sesama individu (Wafa, 2006).

Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang formal maupun bentuk informal. Hubungan sosial adalah gambaran atau cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprosikal (Damsar, 2002).

Dalam hal ini analisis jaringan sosial lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kelompok berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku (Wafa, 2006). Analisis jaringan sosial dimulai dengan gagasan sederhana namun sangat kuat, bahwa usaha utama dalam kajian sosiologis adalah mempelajari struktur sosial dalam menganalisis pola ikatan yang menghubungkan anggota-anggota kelompoknya.

Granovetter melukiskan hubungan ditingkat mikro itu seperti tindakan yang melekat dalam hubungan pribadi konkret dan dalam struktur (jaringan sosial) terhadap hubungan itu. Berdasarkan teori modal sosial yang mana teori ini membahas tentang sumber daya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru dalam masyarakat. Secara langsung modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling percaya dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.

Unsur-unsur modal sosial, menurut Blakeley dan Suggate (1977) dalam Suharto (2007) menyatakan bahwa unsur-unsur modal sosial adalah:

1. Kepercayaan: tumbuhnya sikap saling percaya antar individu dan antar institusi dalam masyarakat.

2. Kohesifikasi: adanya hubungan yang erat dan padu dalam membangun solidaritas masyarakat.
3. Altruisme: paham yang mendahulukan kepentingan orang lain.
4. Gotong-royong: sikap empati dan perilaku yang mau menolong orang lain dan bahu membahu dalam melakukan berbagai upaya untuk kepentingan bersama.
5. Jaringan dan kolaborasi sosial: membangun hubungan dan kerjasama antar individu dan antar institusi.

Di sisi lain Vahapiet dan Ghosal (1998) dalam Mega (2013) berfokus pada tingkat analisis individu dalam menyusun dimensi modal sosial menjadi tiga, yaitu:

- a. Dimensi struktural
- b. Dimensi relasional
- c. Dimensi kognitif

Dimensi lain yang juga sangat menarik perhatian adalah yang berkaitan dengan tipologi modal sosial, yaitu bagaimana perbedaan pola-pola interaksi berikut konsekuensi antara modal sosial yang berbentuk *bonding/exclusive* atau *bridging*. Keduanya memiliki implikasi yang berbeda pada hasil-hasil yang dapat dicapai dan pengaruh-pengaruh yang dapat muncul dalam proses kehidupan dan pembangunan masyarakat.

- a. Modal Sosial Terikat (*Bonding Social Capital*)

Didalam bahasa lain *bonding social capital* ini di kenal pula sebagai ciri *sacred society*. Menurut Putman (1993) pada masyarakat *sacred society* tertentu mendominasi dan mempertahankan struktur masyarakat yang totalitarian, *hierarchical* dan tertutup. Didalam pola interaksi sosial sehari-hari selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan level hierarki tertentu dan feodal. Menurut Hasbullah (2006) menyatakan,

pada masyarakat yang *bonded* atau *inward looking* atau *sacred*, meskipun hubungan sosial yang tercipta memiliki tingkat kohesifitas yang kuat, akan tetapi kurang merefleksikan kemampuan masyarakat tersebut untuk menciptakan dan memiliki modal sosial yang kuat. Kekuatan yang tumbuh sekedar dalam batas kelompok dalam keadaan tertentu, struktur hierarki feodal, kohesifitas yang bersifat bonding.

b. Modal Sosial Yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*)

Hasbullah (2006) bentuk modal sosial yang menjembatani ini biasa juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi, atau masyarakat. Prinsip-prinsip universal tentang: 1. Persamaan; 2. Kebebasan; serta 3. Nilai-nilai kemajemukan dan humanitarian (kemanusiaan, terbuka, dan mandiri). Prinsip persamaan, bahwasanya setiap anggota dalam suatu kelompok masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap anggota kelompok. Prinsip kemajemukan dan humanitarian, bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain yang merupakan prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, group, kelompok, atau suatu masyarakat. Kuat untuk membantu orang lain, merasakan penderitaan orang lain, berempati terhadap situasi yang dihadapi orang lain, adalah merupakan dasar-dasar ide humanitarian.

Selanjutnya Hasbullah (2006) menjelaskan unsur-unsur pokok dalam modal sosial meliputi: Partisipasi Dalam Suatu Jaringan; *Resiprocity*, *Trust*, Norma Sosial; Nilai-nilai; serta Tindakan yang Proaktif.

1. Partisipasi dalam suatu jaringan

Kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern akan memiliki

tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan rentang jaringan yang lebih luas.

2. *Reciprocity*

Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok selalu mewarnai modal sosial. Seseorang atau banyak orang dari suatu kelompok memiliki semangat membantu yang lain tanpa mengharapkan imbalan seketika. Hal ini didasari oleh nuansa *altruism* (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain).

3. *Trust*

Trust atau rasa percaya merupakan bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung dan tidak merugikan diri dan kelompoknya.

4. Norma Sosial

Norma sosial merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Contoh norma sosial: bagaimana cara menghormati pendapat orang lain, norma untuk hidup sehat, norma untuk tidak mencurangi orang lain.

5. Nilai-nilai

Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat, misalnya: nilai prestasi, kerja keras, kompetisi dan nilai harmoni.

6. Tindakan yang Proaktif

Adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka

dalam suatu kegiatan masyarakat seperti misalnya: membersihkan lingkungan tempat tinggal, berinisiatif menjaga keamanan bersama.

2.6.3. Pengendalian Kredit Melalui Modal Sosial

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehinggadengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalaubetul-betul yakin bahwa si penerima kredit akanmengembalikan kredit yang diterimanya sesuaidengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telahdisetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa adanyakeyakinan tersebut, suatu lembaga kredit dipastikantidak akan meneruskan sampai kepada pemberian kredit.

Menurut Suyatno (2003) ada 4 (empat) unsur yang terdapat dalam hal perkreditan, yaitu: Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai suatu akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan, inilah yang menyebabkan unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah

jaminan dalam pemberian kredit. Prestasi atau objek kredit itu tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

Kepercayaan yang merupakan dasar bagi lembaga perkreditan untuk memberikan kredit kepada nasabah merupakan bagian dari modal sosial. Pelaksanaan pengendalian kredit memanfaatkan apa yang disebut modal sosial. Penyertaan modal sosial dalam pengendalian intern, berlaku bagi perusahaan, maupun nasabah BPR. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa baik nasabah maupun manajemen BPR merupakan komunitas yang saling berhubungan dalam satu perusahaan, sehingga mereka harus tunduk kepada peraturan perusahaan dalam hal ini adalah BPR XYZ Cabang Kepanjen. Hal ini mengakibatkan, setiap penyimpangan yang terjadi, siapapun yang melakukannya, dapat dikenai sanksi. Selain itu, BPR sebagai lembaga perkreditan formal menggunakan pula mekanisme pengendalian intern berbasis akuntansi yang diterapkan pada entitas bisnis pada umumnya. Jadi, ada dua mekanisme pengendalian yang berlaku secara simultan pada BPR XYZ Cabang Kepanjen, yakni pengendalian yang mengikuti kaidah-kaidah struktur pengendalian intern, dan yang lainnya adalah pengendalian yang bertumpu pada penggunaan modal sosial yang dimiliki oleh perusahaan dan nasabah didalamnya.

Pengendalian merupakan suatu proses menentukan kesesuaian tindakan dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengendalian juga diikuti dengan tindakan pencegahan, oleh karena itu dalam pengendalian kredit hal yang perlu diperhatikan lebih dahulu adalah seleksi terhadap calon peminjam. Dengan adanya seleksi tersebut diharapkan dapat memperkecil resiko kelalaian dalam pengembalian kredit. Menurut Hendrojogi (2006) "pengendalian adalah suatu aktivitas manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mencegah

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan".Jadi tujuan utama dari pengendalian adalah memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau dengan kata lain lancar.

Pengendalian bersifat korektif artinya bahwa bilamana terjadi penyimpangan-penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin, jadi bukan merupakan fungsi negative dari manajemen. Yang dimaksud dengan pengendalian kredit di sini adalah kebijakan yang diambil oleh manajemen BPR XYZ Cabang Kepanjen dalam usaha menjaga aktiva lancar yang berwujud tagihan yang timbul karena adanya pemberian pinjaman kepada para anggota dan senantiasa menjaga agar tidak terjadi tunggakan pengembalian kredit, sehingga likuiditas arus kas menyangkut pemberian dan pengembalian kredit dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Empat penelitian yang bertemakan sejenis yaitu mengenai kredit bermasalah telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Pertanyaan Penelitian	Variabel (unit analisis) dan jenis penelitian	Hasil
1	Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara	Munte M.H.M., dan Santi P.S (2014)	Bagaimana proses yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah yang ada di PT.BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten	Jenis penelitian: kualitatif. Unit analisis: Data penggolongan kredit atau kolektibilitas kredit yang ada diperusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta data mengenai	1.PT.BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan mengalami peningkatan kredit bermasalah yaitu kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas kredit Kurang

No.	Judul	Peneliti	Pertanyaan Penelitian	Variabel (unit analisis) dan jenis penelitian	Hasil
			Labuhan Batu utara dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013?	upaya yang dilakukan perusahaan dalam menyelesaikan atau menaggulangi kredit bermasalah yang ada diperusahaan.	<p>lancar, Diragukan, dan Macet yang dibandingkan dari 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 jumlahnya sebesar Rp.175.599.000, tahun 2012 sebesar Rp. 175.620.000, dan tahun 2013 sebesar Rp. 357.973.000.</p> <p>2. Pihak bank yaitu PT.BPR Mangatur Ganda dalam menggolongkan kredit berdasarkan kolektibilitasnya, hanya menggolongkan berdasarkan 4 jenis kolektibilitas yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Pihak bank tidak mencantumkan golongan kredit dalam perhatian khusus.</p> <p>3. Pemicu utama kredit bermasalah pada PT.BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan pada tahun 2013 adalah pergerakan harga jual komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit.</p>

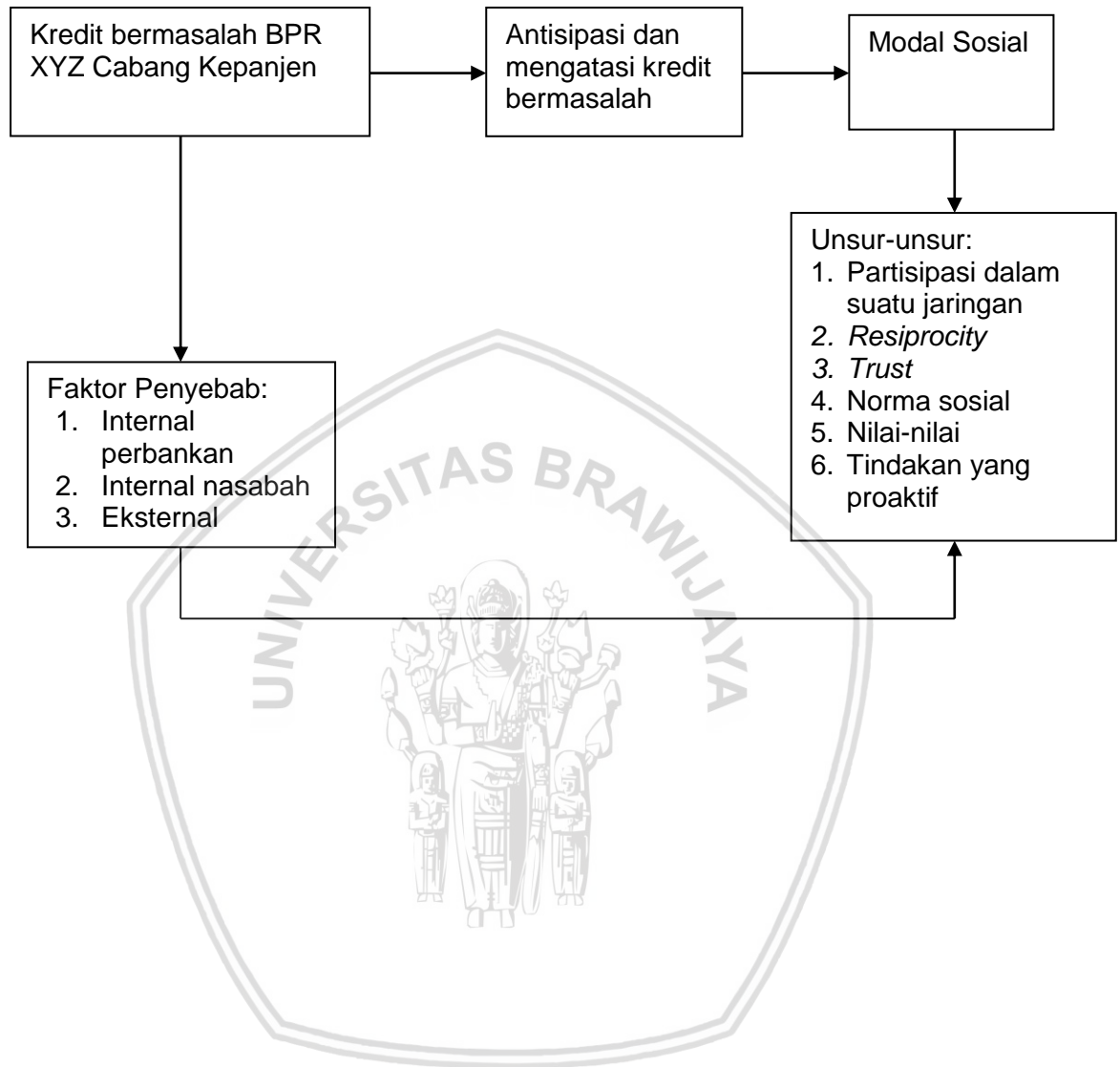
No.	Judul	Peneliti	Pertanyaan Penelitian	Variabel (unit analisis) dan jenis penelitian	Hasil
					<p>4. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di PT.BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan pihak bank mengambil beberapa alternatif penyelesaian kredit bermasalah yaitu secara damai dan jalur hukum, dan untuk kategori kredit yang tergolong macet, apabila kreditnya masih dapat diselamatkan maka pihak bank mengambil alternatif penyelesaian kredit dengan beberapa cara yaitu <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i>, dan <i>restructuring</i>.</p> <p>5. Pengawasan kredit pada bank tergolong sudah cukup baik,hal ini dapat dilihat dari sistem dan prosedur kredit yang dijalankan oleh pihak bank.</p> <p>6. Hal lain yang menyebabkan kredit bermasalah juga dikarenakan kelalaian petugas</p>

No.	Judul	Peneliti	Pertanyaan Penelitian	Variabel (unit analisis) dan jenis penelitian	Hasil
					bank dalam menilai karakter dan nilai jaminan nasabah.
2	Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank "X" di Kabupaten Jember	Mukhsinati S (2011)	Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank "X" di Kabupaten Jember?	Variabel independen: X1= <i>Character</i> , X2= <i>Capacity</i> , X3= <i>Capital</i> , X4= <i>Collateral</i> X5= <i>Condition</i> , sedangkan variabel dependen: Y=kredit macet. Jenis penelitian: Kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda menggunakan uji t dan uji F.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, berdasarkan faktor <i>Character</i> (X ₁), kedua faktor <i>Capacity</i> (X ₂), terakhir faktor <i>Capital</i> (X ₃). Sedangkan untuk faktor <i>Collateral</i> (X ₄) dan <i>Condition</i> (X ₅) menunjukkan hasil yang berbeda dimana variabel tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap adanya kredit macet.
3	Evaluating the Impact of Bank Specific Determinant of Non-performing Loans in Namibia	Sheefeni JPS (2015)	Bagaimana prediksi variabel spesifik bank yang mempengaruhi NPL pada bank umum di Namibia	Dengan menggunakan data time series, analisa dilakukan dengan teknik uji akar unit, kointegrasi, IRF dan variance decomposition pada data kuartalan selama periode 2001-2014. Dua model diestimasi dimana ROA dan ROE menjadi proksi profitabilitas, diantara variabel-variabel lain yang menjelaskan NPL.	Hasil penelitian menunjukkan ROA, ROE, rasio pinjaman terhadap total aset, log total aset merupakan variabel utama yang mempengaruhi NPL. Lebih spesifik, hubungan negatif antara NPL dengan ROA dan ROE ditemukan. Sedangkan hubungan positif ditemukan pada

No.	Judul	Peneliti	Pertanyaan Penelitian	Variabel (unit analisis) dan jenis penelitian	Hasil
					hubungan antara NPL dengan rasio pinjaman terhadap total aset begitu juga NPL dengan log total aset.
4	Economic Determinant of Non-Performing Loan: Perception of Pakistani Bankers	Farhan M, Ammara S, Abrar HC, dan Fareeha K., (2012)	Bagaimana persepsi pegawai bank di Pakistan mengenai faktor ekonomi penyebab NPL sektor perbankan sejak 2006	Analisis korelasi dan analisis regresi digunakan untuk menganalisa dampak dari variabel yang digunakan (suku bunga, krisis energi, pengangguran, inflasi, pertumbuhan PDB dan kurs) terhadap NPL sektor perbankan di Pakistan	Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa suku bunga, krisis energi, pengangguran, inflasi, dan kurs memiliki hubungan positif signifikan terhadap NPL sektor perbankan di Pakistan sedangkan pertumbuhan PDB memiliki hubungan negatif signifikan dengan NPL sektor perbankan di Pakistan. Penelitian ini juga mendiskusikan tentang bagaimana pinjaman yang baik akan berubah menjadi pinjaman bermasalah ketika terjadi krisis energi di Pakistan dan bagaimana buruknya dampak yang ditimbulkan dari krisis tersebut terhadap industri perbankan di Pakistan.

2.8 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Desain penelitian ini merupakan kajian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus di sesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah menganggap makna sebagai perhatiannya. Merujuk pada ungkapan dari Moustakas (1994) dengan mengacu pada bahasan-bahasannya yang membahas doktrin-doktrin filosofis dan prosedur-prosedur dalam metode fenomenologi, maka strategi penelitian ini didalam desainya peneliti mengidentifikasi hakikat suatu fenomena berdasarkan pengalaman individu-individu yang berstatus sebagai nasabah BPR XYZ Cabang Kepanjen. Untuk itu, peneliti perlu mengkaji subyek penelitian dengan terlibat langsung guna mengembangkan pola-pola dan relasi makna-makna yang ada.

Dalam proses ini, peneliti mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman-pengalamam pribadi agar dapat memahami pengalaman-pengalaman subyek yang akan diteliti, karena pendekatan fenomenologi merupakan tradisi riset kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi serta dan berfokus pada pengalaman subyek itu sendiri. Lebih lanjut, pendekatan fenomenologi menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial dan budaya dimana pengalaman itu terjadi. Gagasan ini juga dipertegas oleh Littlejohn (1996:204) dengan menyebutkan "*Phenomenology makes actual lived experience the basic data of reality*" dan metode penelitian kualitatif dirasakan lebih cocok dan relevan dengan realitas

yang akan diteliti karena berupaya menggali dan memahami bagaimana unsur-unsur modal sosial dapat mengatasi resiko kredit bermasalah pada BPR XYZ Cabang Kepanjen.

3.2 Fokus Penelitian dan Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian adalah implementasi unsur-unsur modal sosial, dampak serta upaya penanggulangan, yakni:

Tabel 3.1 : Unit Analisis Penelitian

Unit Analisis	Konsep	Indikator
Peran Debitur	Penilaian kredit (Sudirman, 2006) melalui kriteria 5C dan unsur modal sosial (Hasbullah, 2006)	Kriteria 5C: 1. <i>Character</i> (watak) 2. <i>Capacity</i> (kemampuan) 3. <i>Capital</i> (modal) 4. <i>Collateral</i> (Jaminan) 5. <i>Condition</i> (kondisi ekonomi) Unsur modal sosial: Partisipasi Dalam Suatu Jaringan; <i>Resiprocity</i> ; <i>Trust</i> ; Norma Sosial; Nilai-nilai; serta Tindakan yang Proaktif
Peran Kreditur	Suyanto (1999) yang menyatakan, bahwa faktor - faktor penyebab kredit macet terdiri dari dua faktor intern dan faktor ekstern.	1. Faktor intern (kegagalan mengelola usaha, kebijakan perkreditan yang kurang menunjang, kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit, dan pemberian dan pengawasan yang menyimpang dari prosedur) 2. Faktor ekstern (lingkungan usaha debitur yang kurang menunjang, musibah atau bencana alam, dan persaingan antara lembaga keuangan)
Dampak bagi perusahaan	Teori Mahmoeddin, As (2002), menyatakan kredit bermasalah akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain: (1) likuiditas, (2) rentabilitas, (3) profitabilitas, (4) bonafiditas, (5) tingkat kesehatan bank dan (6) modal kerja.	1. Penurunan laba 2. Perputaran kas terganggu 3. Tingkat kesehatan bank 4. Modal bank 5. Tingkat kepercayaan nasabah menurun

Unit Analisis	Konsep	Indikator
Penyelesaian	Teori Kasmir (2002) menyatakan bahwa penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: (1) <i>Rescheduling</i> (penjadwalan kembali), (2) <i>Reconditioning</i> (perubahan persyaratan), (3) <i>Restructuring</i> (Penataan ulang), (4) <i>Kombinasi</i> (gabungan dari tiga metode <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , dan <i>Restructuring</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Resceduling</i> 2. <i>Reconditioning</i> 3. <i>Restructuring</i>

Sumber: Sudirman, 2006 (diolah)

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah subyek data diperoleh atau dapat dijabarkan yaitu seseorang atau suatu hal atau benda dimana peneliti mengamati, bertanya, atau membaca tentang hal yang berkenaan dengan fokus penelitian, yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh. Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, buku-buku, artikel dan lain-lain. Sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh, atau dikumpulkan, atau juga data yang didapatkan dari laporan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru, data primer dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil wawancara dengan tim marketing, AO, surveyor dan kepala cabang BPR XYZ Cabang Kepanjen
- b. Hasil wawancara dengan debitur BPR XYZ Cabang Kepanjen

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data primer. Data sekunder ini, disebut juga sebagai data yang telah tersedia. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi seputar BPR XYZ Cabang Kepanjen yang didapat melalui Laporan internal perusahaan.

Data acuan juga mencakup hasil pengkajian literatur dan artikel-artikel, jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengamatan lapangan dilakukan terutama untuk pengecekan ulang data sekunder dengan fakta-fakta yang terjadi. Kegiatan utama difokuskan untuk mengetahui penyebab kredit macet dari dua sisi yakni kreditur dan debitur BPR XYZ Cabang Kepanjen.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberi informasi tentang dirinya dan orang lain (Hamidi, 2007:5). Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive* (sengaja) dan *snow ball*. Teknik *purposive* (sengaja) merupakan pengambilan informan dilakukan dengan cara ditentukan oleh peneliti sendiri dengan mempertimbangkan karakteristik dari sifat informan tersebut. Dalam hal ini peneliti harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang informannya sehingga memperoleh informan yang benar-benar sesuai dengan permasalahan dan dapat memberikan informasi yang diperlukan (Wisadirana. 2005).

Dengan teknik *purposive* peneliti tidak menjadikan semua debitur yang mengambil produk pinjaman pada BPR XYZ Cabang Kepanjen sebagai informan. Melainkan mereka yang benar-benar paham dan sudah mengambil pinjaman pada BPR XYZ Cabang Kepanjen, sehingga sesuatu itu bukan

diketahui tetapi juga dilakukan. Dan informan yang dipilih oleh peneliti adalah mereka yang benar-benar tergolong masih sedang mengambil pinjaman pada BPR XYZ Cabang Kepanjen. Adapun kriteria informan yang akan dipilih oleh peneliti adalah debitur yang paham dan sedang atau akan mengambil pembiayaan ulang pada BPR XYZ Cabang Kepanjen dan memiliki waktu yang memadai untuk dimintai wawancara, dengan cara ini maka suasana wawancara akan lebih baik sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan valid.

Sedangkan untuk teknik selanjutnya yaitu peneliti menggunakan teknik *snowball* merupakan teknik dimana penentuan informan yang peneliti teliti atas dasar pertimbangan dari informan sebelumnya yang mengarahkan pada informan selanjutnya (Sugiono, 2010: 54). Teknik *snowball* juga digunakan oleh peneliti karena dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari informan sebelumnya dalam menentukan informan selanjutnya yang mampu memberikan informasi sesuai tujuan penelitian. Tanpa menggunakan teknik *snowball*, maka peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan informan selanjutnya yang paham dan kompeten dalam permasalahan penelitian.

Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: (Suyanto, 2005)

- 1) informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 3 orang yang berasal dari pihak BPR XYZ Cabang Kepanjen yang mengetahui informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan serta SOP pemberian kredit.
- 2) Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti memilih 3 informan utama yang berperan secara langsung di lapangan dalam memasarkan produk pinjaman dari BPR XYZ Cabang Kepanjen.

Serta peneliti menunjuk 3 informan yang berasal dari nasabah yang sedang, pernah atau akan melakukan pinjaman ulang pada BPR XYZ Cabang Kepanjen.

- 3) Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi mengenai posisi perusahaan dan juga nasabah dalam perjanjian kredit. Mereka adalah tim surveyor dan penilai jaminan nasabah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab sekaligus memecahkan permasalahan yang ada. Maka dari itu data tersebut harus valid dan akurat. Dalam teknik pengumpulan data, menurut Creswell (1994) penelitian kualitatif terbagi dalam tiga tipe dasar yaitu:

1. Pengamatan (observasi).

Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap obyek yang diteliti. Pengamatan juga dilakukan terhadap fenomena dari obyek yang diteliti.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (peneliti) kepada informan dengan maksud tertentu. Peneliti di sini akan menggunakan wawancara berstruktur dan atau tidak berstruktur. Hal ini dimungkinkan untuk mengurangi terjadinya kekeliruan dalam mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, metode wawancara ini lebih dipandang efektif sebab, para subyek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai, sekaligus mereka akan

mengetahui pula maksud dari wawancara itu. Sehingga, dapat diperoleh data informasi yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk tanya jawab secara langsung dengan informan yakni debitur BPR XYZ Cabang Kepanjen. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari fokus penelitian.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen suatu data. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsir bahkan meramalkan. Pengumpulan data melalui penggunaan sumber-sumber tertulis yang berupa buku, majalah, buletin, laporan-laporan penelitian terdahulu, arsip-arsip perusahaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan.

3.6 Teknik Analisis Data

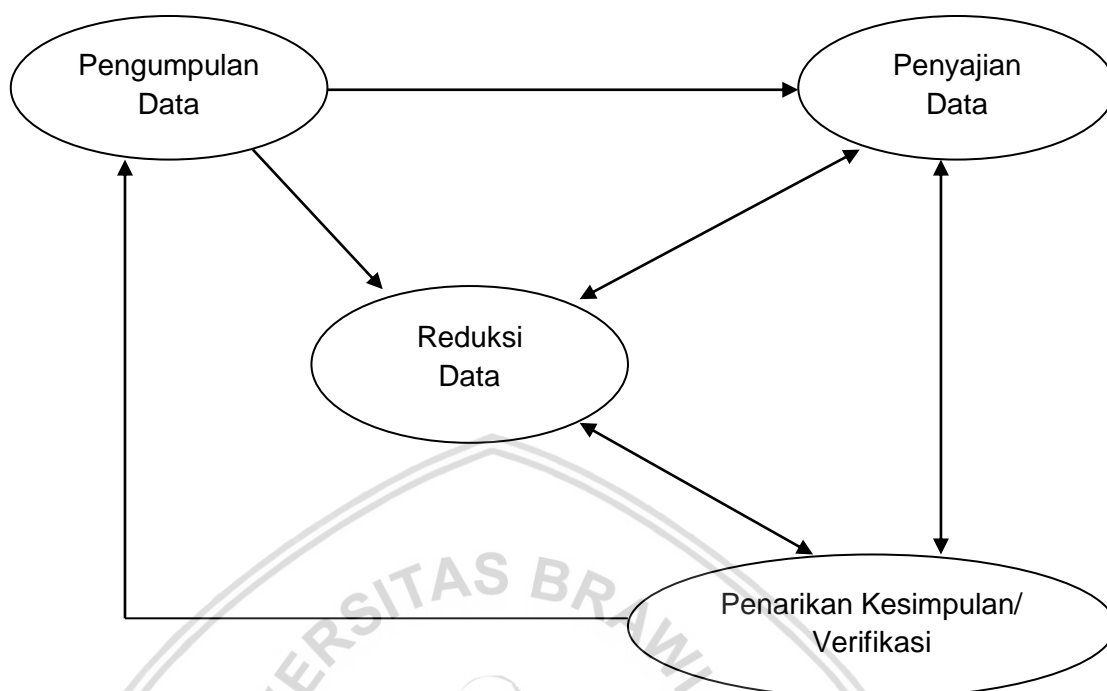
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena dengan analisis suatu data dapat diberi arti atau makna yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah penelitian. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang bersifat statistik.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta

menyimpulkan data (Miles dan Huberman, 1992: 18-21). Tahapan analisis data dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yaitu proses mengumpulkan data-data mentah yang belum diolah dan dianalisis serta merupakan hasil dari interview terhadap informan perusahaan.
2. Reduksi data yaitu data lapangan dari semua informan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
3. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi dari informan yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui penyajian data, peneliti menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau konfigurasi yang mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi, data yang telah diperoleh di lapangan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

Gambar 3.1 : Langkah-langkah Analisis Data



Sumber: Miles and Hubberman (1992: 20)

Ketiga komponen analisis berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar, apabila ternyata kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ketiga komponen analisis dengan pengumpulan data dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai.

Alasan peneliti memilih analisis data interaktif ini adalah karena dalam bentuk ini peneliti tetap dapat bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, maka data perlu di uji keabsahannya. Moleong (2012) menyebutkan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2007) merupakan *“the aim is not to determinate the truth about same social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated”*. Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2007); *“Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures”*. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, digunakan tiga jenis yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh.

Menurut Patton dalam Moleong (2012:330), triangulasi sumber (triangulasi dengan sumber) berarti membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu

- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat umum, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Triangulasi metode pengumpulan data adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek. Sedangkan triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja tetapi diulang-ulang pada waktu yang berbeda hingga ditemukan titik jenuh data.

Dalam hal ini jangan mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Akan selalu terdapat perbedaan persepsi antar satu informan dengan informan lainnya. Yang terpenting ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu-waktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, triangulasi, peneliti dapat *recheck* temuannya, dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan dan mengeceknya dengan berbagai sumber data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan dari sisi nasabah diambil sebanyak 24 orang dengan rincian informan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang (71%) dan informan berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang (29%). Dari 24 orang informan tersebut, rata-rata informan berusia diatas 30 tahun dimana informan termuda berusia 27 tahun sedangkan informan tertua berusia 45 tahun.

Tabel 4.1 **Jenis Kelamin Informan Penelitian (dalam persentase)**

Informan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)		
		<30	30-40	>40
Laki-laki	71%	20,8%	33,3%	16,7%
Perempuan	29%	16,7%	12,5%	0%
Total	100%	37,5%	45,8%	16,7%

Sumber: Data primer, diolah (2017)

Menurut informasi yang diberikan oleh para informan, mereka semua sudah berkeluarga dengan jumlah tanggungan keluarga minimal dua orang dan mereka memiliki pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Tiga orang informan berpendidikan SMA (12,5%), empat orang lainnya berpendidikan D-3 (16,7%) dan selebihnya informan dalam penelitian ini berpendidikan sarjana.

Tabel 4.2 **Tingkat Pendidikan Informan Penelitian (dalam persentase)**

Informan	Tingkat Pendidikan		
	SMA	D-3	S1
Laki-laki	8,3%	12,5%	50%
Perempuan	4,2%	4,2%	20,8%
Total	12,5%	16,7%	70,8%

Sumber: Data primer, diolah (2017)

Informan dalam penelitian ini merupakan nasabah dan pegawai dari BPR XYZ Cabang Kepanjen yang ada di Kabupaten Malang. Delapan orang informan (33,3%) telah menjadi nasabah BPR XYZ Cabang Kepanjen kurang dari lima tahun terakhir. 16 orang informan (66,7%) telah menjadi pegawai BPR XYZ Cabang Kepanjen dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun terakhir.

Tabel 4.3 **Lama Menjadi Nasabah dan Pegawai Bank Syariah (dalam persentase)**

Informan	Lama Menjadi Nasabah Bank Syariah	
	< 5 tahun	5–10 tahun
Nasabah	33,3%	0
Pegawai	0	66,7%
Total	33,3%	66,7%

Sumber: Data primer, diolah (2017)

Seluruh informan nasabah dalam penelitian ini pernah atau sedang mengambil produk pinjaman pada BPR XYZ Cabang Kepanjen. Hanya tiga orang responden atau 37,5% dari seluruh informan yang bersedia untuk meluangkan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, yang telah mengambil pinjaman sebanyak dua kali. Tiga orang informan lainnya atau sebesar 37,5%

telah mengambil pinjaman pada BPR XYZ Cabang Kepanjen sebanyak tiga kali dan informan selebihnya sebanyak dua orang (25%) baru pertama kali mengambil pinjaman pada BPR XYZ Cabang Kepanjen.

4.2. Implementasi Modal Sosial Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah disebabkan kegagalan nasabahnya dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Dampak dari kredit bermasalah akan mempengaruhi laba yang akan diterima oleh bank, dalam hal ini memungkinkan laba yang didapat akan kecil apabila kredit yang diberikan suatu bank kepada nasabahnya mengalami permasalahan dalam pengembaliannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Galuh A, selaku Kabag Kredit BPR XYZ Cabang Kepanjen.

“Kalau sampai terjadi gagal bayar, mbak, maka kondisi bank pasti akan terpengaruh terutama pada perolehan laba.”

Non performing loans (NPL) merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. NPL adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Hariyani, 2010).

NPL BPR XYZ Cabang Kepanjen bertahun-tahun sebelumnya tercatat tinggi. Kasus kredit macet yang dialami oleh BPR XYZ di Kabupten Malang, tidak selalu disebabkan oleh wanprestasi dari sisi debitur namun juga turut andil sisi kreditur itu sendiri. Namun karena adanya modal sosial, kredit bermasalah yang

ada dapat diminimalkan dari tahun ke tahun. Tercatat selama empat tahun terakhir (2014-2017), angka rasio NPL terus mengalami penurunan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Sri Wahyuni, selaku Komisaris BPR XYZ memberikan penjelasan mengenai kondisi NPL selama beberapa tahun terakhir ini.

“Nilai NPL kita tinggi mbak, tapi sudah bisa di minimalisir beberapa tahun terakhir ini. Di tahun 2014 kemarin NPL mencapai poin 13,66. Terus naik di tahun 2015 hingga posisi 14,05 tapi alhamdulillah tahun 2016 sudah bisa diturunkan hingga berada pada poin 12,97. Dan di akhir tahun 2017 kemarin, NPL turun lagi hingga berada di posisi 9,64.”

Penurunan angka rasio NPL, berdampak pada peningkatan ROA. Dengan semakin tingginya return on assets, maka hal tersebut menunjukkan bahwa bank telah meyalurkan kredit guna mendapatkan pendapatan. Aktiva bank atau aset bank terdiri atas aktiva produktif dan aktiva non produktif. Aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, yaitu dalam bentuk, kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivative, penyertaan, transaksi rekening administrative, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan.

Modal sosial yang dalam penerapannya mampu membantu BPR XYZ menurunkan angka NPL, memiliki beberapa tipologi. Dua tipologi modal sosial yakni: (1) Modal Sosial Terikat (*Bonding Social Capital*) dan, (2) Modal Sosial yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*). Ciri khas dari modal sosial terikat yakni anggota kelompok maupun kelompok dalam konteks ide, relasi dan perhatian lebih berorientasi kedalam (*inward looking*), dengan ragam masyarakat yang homogenius. Fokus perhatiannya adalah menjaga nilai-nilai yang turun temurun telah diakui dan dijalankan sebagai bagian dari tata perilaku dan perilaku moral dari entitas sosial tersebut, umumnya mereka konservatif.

Sedangkan modal sosial yang menjembatani menggunakan prinsip-prinsip yang universal mengenai (a) *persamaan*, yakni bahwa setiap anggota kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama, (b) *kebebasan*, yakni setiap anggota kelompok bebas berbicara, bebas mengemukakan pendapat atau ide-ide, sehingga memberikan kontribusi terhadap perkembangan organisasi, (c) *kemajemukan dan humanitarian* yakni nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan kelompok atau *group*. Kemajemukan disini membangun kesadaran bahwa hidup dengan beragam suku, ras, budaya dan cara berfikir yang berbeda adalah hal yang logis, biasanya kelompok ini memiliki sikap dan pandangan terbuka dan mengikuti perkembangan dunia diluar kelompoknya (*outward looking*). Kedua tipologi ini perlu dipahami oleh seorang manajer yang akan membawahi suatu kelompok yang akan dipimpinnya, sehingga kebijakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perannya sebagai atasan akan tepat mengenai sasaran (Jousairi, 2006).

Berikut adalah paparan hasil penelitian mengenai peran unsur-unsur dalam modal sosial dalam mengatasi kredit bermasalah pada BPR XYZ Kabupaten Malang.

4.2.1. Unsur partisipasi dalam jaringan dan tindakan yang proaktif

Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang formal maupun bentuk informal. Hubungan sosial adalah gambaran atau cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprosikal (Damsar, 2002).

Dalam hal ini analisi jaringan sosial lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kelompok berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang

bagaimana mereka seharusnya berperilaku (Wafa, 2006). Analisis jaringan sosial dimulai dengan gagasan sederhana namun sangat kuat, bahwa usaha utama dalam kajian sosiologis adalah mempelajari struktur sosial dalam menganalisis pola ikatan yang menghubungkan anggota-anggota kelompoknya.

Granovetter melukiskan hubungan ditingkat mikro itu seperti tindakan yang melekat dalam hubungan pribadi konkrit dan dalam struktur (jaringan sosial) terhadap hubungan itu. Berdasarkan teori modal sosial yang mana teori ini membahas tentang sumber daya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru dalam masyarakat. Secara langsung modal sosial di yakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling percaya dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.

Analisis jaringan sosial lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kelompok berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Hal ini sangat bermanfaat dalam hubungan antara kreditur dengan debitur. Kreditur dapat menilai keteraturan individu dalam suatu kelompok berperilaku yang dikaitkan dengan cara mereka menyikapi kredit yang diambil. Hal ini diungkapkan oleh Vivin, bagian kredit pendataan di BPR XYZ Kabupaten Malang.

“Dengan unsur jaringan sosial, kreditur akan mendapatkan info mengenai kedisiplinan debitur dalam mengangsur, karakter debitur menyikapi pinjaman yang mereka ajukan dan sebagainya. Info mengenai cara debitur berperilaku akan memudahkan screening kreditur ketika nasabah mengajukan pinjaman dan jaringan sosial yang kuat akan semakin memperjelas karakter dan cara berperilaku terutama ketika mengatasi masalah kredit bermasalah.”

Dari sisi nasabah, hal ini berlaku juga untuk menilai cara berperilaku BPR XYZ Kabupaten Malang ketika menghadapi adanya kredit bermasalah. Menurut pengakuan beberapa nasabah, bank tidak serta merta menerbitkan surat peringatan ketika terjadi kredit bermasalah. Petugas lapang akan menghubungi

dan mendatangi debitur ketika ada informasi dari teller bahwa debitur atas nama X mengalami gagal bayar atau terlambat mengangsur setelah sebelumnya teller melakukan *desk call* untuk mengingatkan jatuh tempo angsuran. Petugas lapang yang turun langsung menemui debitur tidak diperbolehkan menerima angsuran ataupun melakukan pemaksaan kepada debitur untuk membayar. Tujuan mereka hanya satu yaitu mengklarifikasi terjadinya gagal bayar atau keterlambatan dan mengetahui penyebabnya secara langsung. Hasil visiting akan digunakan oleh bank untuk melakukan tindakan selanjutnya. Hal berikut yang diungkapkan oleh Mutmainah, salah satu nasabah BPR XYZ Kabupaten Malang.

“Kalo ada gagal bayar, biasanya ada mas-mas dari BPR XYZ Kabupaten Malang yang datang ke nasabah, mbak. Mereka cuman memastikan kondisi kita kenapa kok ga bayar cicilan. BPR XYZ Kabupaten Malang baik loh mbak. Sebelum mas-masnya datang juga kita bakal di telpon dulu, ditanya kenapa ga nyicil. Trus dibilang juga kalo mas-masnya akan datang ngecek. Baru deh nanti kita bisa mengajukan keringanan waktu pembayaran atau gimana caranya lah mbak, biar ga di denda dan nama kita tetap bersih di BPR XYZ Kabupaten Malang. Jadi untuk ke depannya kalo mau pinjem-pinjem lagi ga sulit.”

Partisipasi nasabah dalam suatu jaringan sosial akan memudahkan mereka membuka jalan terhadap sektor finansial karena secara kolektif, kelompok masyarakat yang memiliki reputasi bagus akan lebih diterima bahkan dicari oleh pihak lain untuk menyalurkan bantuan dalam berbagai jenis. Bagi pihak bank, partisipasi yang aktif dari nasabah akan semakin memudahkan mereka dalam mengontrol kredit yang dikucurkan. Karena adanya penilaian yang positif di masyarakat maka pihak bank akan bersikap positif dan mendukung nasabah.

Tindakan yang pro aktif adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat seperti misalnya: berinisiatif menjaga keamanan lingkungan agar kondusif untuk melakukan

kegiatan-kegiatan ekonomi. Termasuk menjaga nama baik bersama dimana pun berada dan terhadap pihak manapun. Sehingga nama suatu komunitas masyarakat akan melekat baik bagi pihak luar. Pelekatan predikat baik ini akan menugntungkan kedua belah pihak apabila terjadi kerjasama dikemudian hari semisal kegiatan simpan-pinjam dengan lembaga keuangan, kegiatan CSR perusahaan, dan sebagainya.

4.2.2. Unsur norma dan nilai sosial

Norma sosial merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Contoh norma sosial: norma untuk tidak mencurangi orang lain. Sedangkan Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat, misalnya: nilai prestasi, kerja keras, kompetisi dan nilai harmoni.

Norma sosial yang berupa norma untuk tidak mencurangi orang lain akan mencegah debitur untuk melakukan tindakan yang akan merugikan mereka secara individu, mereka secara kelompok maupun pihak luar yang berinteraksi dengan mereka baik secara pribadi maupun kelompok. Dan hal ini didukung oleh nilai-nilai yang diyakini oleh kelompok masyarakat demi menjaga keharmonisan baik melalui kompetisi, prestasi dan juga kerja keras. Hal ini diungkapkan oleh M. Nasrul, selaku nasabah BPR XYZ Kabupaten Malang dan warga aktif di lingkungan BPR.

“Norma sosial? Aturan a mbak? Nilai-nilai hidup dalam masyarakat sini? Iyaa, ada. Jelas lah mbak, namanya aja kita hidup bermasyarakat, mesti ada nilai-nilai atau unggah-ungguh yang masi dipakai oleh warga. Kita sebagai warga, satu lingkungan, wajib mbak saling menjaga. Menjaga nama baik kita, nama baik pribadi dan juga kepercayaan antar warga. Pokoknya kita harus merasa aman dan nyaman di lingkungan sendiri. Gimana caranya? Yaa dengan berbuat baik itu tadi mbak. Trus peduli sama lingkungan dan tetangga. Yang guyub, rukun. Ada apa-apa itu saling toleransi dan tolong menolong. Kalo ada kegiatan apa, berusaha

bersama, maju bersama, menang bersama. Intinya dari warga dan untuk warga. Termasuk tolong menolong ketika tetangga ada kesulitan finansial juga, mbak”.

Adanya norma sosial dan nilai positif yang dianut masyarakat di sekitar BPR XYZ Kabupaten Malang, membuat hubungan antara masyarakat dengan pihak BPR semakin erat dan bergotong royong. Nasabah dari masyarakat sekitar BPR dapat meminimalkan adanya resiko gagal bayar atau kredit bermasalah karena mereka terikat pada norma sosial dan nilai-nilai kemasyarakatan disamping karena adanya kontrak perjanjian personal antara nasabah dengan pihak bank ketika melakukan pengajuan kredit. Hal ini diungkapkan oleh Indra, surveyor BPR XYZ Kabupaten Malang.

“Adanya norma sosial dan nilai-nilai yang dianut juga akan mempengaruhi perilaku pegawai bank serta menentukan cara mereka dalam berperilaku dan mengatasi setiap ada permasalahan antara pihak bank dengan nasabah. Mereka mengutamakan positif thinking atas semua yang terjadi dalam hubungan tersebut. Dan selalu mendahulukan cross check kondisi lapang sebelum menilai keterlambatan atau gagal bayar nasabah sebagai bentuk kecurangan pada kontrak perjanjian kredit.”

4.2.3. Unsur reciprocity

Reciprocity yang merupakan kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok selalu mewarnai modal sosial. Seseorang atau banyak orang dari suatu kelompok memiliki semangat membantu yang lain tanpa mengharapkan imbalan seketika. Hal ini didasari oleh nuansa *altruism* (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain).

Reciprocity sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak baik itu dari sisi kreditur maupun dari sisi debitur. Dengan adanya reciprocity, individu dalam suatu kelompok yang dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat di seputar BPR XYZ Kabupaten Malang, akan saling membantu antar sesama anggota kelompok terutama ketika salah satu dari mereka mengalami kesulitan finansial dan butuh bantuan modal untuk usahanya. Reciprocity yang tinggi akan

membuat satu individu membantu individu lain dalam kelompoknya bahkan tanpa diminta terlebih dahulu mereka akan memberikan informasi mengenai kemudahan kredit yang diberikan oleh bank. Dan mereka tidak akan segan untuk merekomendasikan salah satu anggota kelompoknya yang membutuhkan bantuan pinjaman modal kepada petugas bank langsung agar dapat segera ditindak lanjut petugas lapangan ketika ada pengajuan kredit dari yang bersangkutan.

Berikut penjelasan Mutmainah, nasabah BPR XYZ Kabupaten Malang, kepada peneliti terkait reciprocity:

“Jadi gini mbak, soal tolong menolong antar anggota dalam satu lingkungan disini ini tidak hanya terbatas pada kegiatan sosial seperti menolong tetangga waktu mereka ada hajatan saja. Tetapi juga sebisa mungkin menolong dalam segala hal seperti keuangan. Tanpa diminta, saya pasti akan merekomendasikan BPR XYZ Kabupaten Malang kepada tetangga yang butuh modal. Kenapa? Karena prinsip saya, kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Ngasi mereka jalan keluar aja lah mbak, soal mereka akan nerima dan menindak lanjut itu sudah bukan urusan saya. Yang penting saya sudah memberikan informasi kalo mereka butuh modal. Tapi kebanyakan sih mbak, mereka langsung minta antar ke BPR XYZ Kabupaten Malang setelah saya jelaskan tata cara pengajuan disana dan keuntungannya.”

Keuntungan yang dirasa oleh BPR XYZ Kabupaten Malang dijelaskan oleh ibu Sri Wahyuni sebagai berikut:

“Reciprocity membuat sistem referensi nasabah semakin handal dan terpercaya. Petugas lapangan dengan adanya referensi dari nasabah terpercaya sebelumnya, dapat mempersingkat waktu penilaian karakter calon debitur selanjutnya. Semakin singkatnya waktu yang dibutuhkan oleh petugas lapangan untuk melakukan screening calon debitur, semakin cepat pula bantuan modal dicairkan oleh pihak bank. Dan dengan adanya reciprocity, keterlambatan ataupun gagal bayar dapat diminimalisir. Kalaupun terjadi, dapat segera diselesaikan karena dari awal sebelum ada perjanjian kredit yang mengikat kedua belah pihak, karakter dan kapasitas debitur sudah dinilai oleh pihak bank.”

4.2.4. Unsur trust

Unsur modal sosial telah diimplementasikan sejak awal penilaian kredit terutama poin kepercayaan. Didasarkan pada tulisan James Coleman,

Fukuyama, Putnam dan lainnya, menyampaikan bahwa modal sosial, khususnya kepercayaan, berkembang melalui norma dan timbal balik serta kerjasama sukses dalam jaringan sipil. Kepercayaan memainkan peranan penting dalam mendorong kemakmuran ekonomi dan membuat demokrasi bekerja (Fukuyama,1995, Putnam,1990 dalam Quigley, 1996).

Kasus modal sosial yang bertumpu pada kepercayaan dan ekspektasi, seseorang yang dianggap jujur dan memiliki reputasi bagus akan lebih mudah memperoleh penghargaan dari pada individu yang tidak memiliki kredibilitas, misalnya dalam hal mendapatkan kredit. Dalam masyarakat tradisional, hubungan transaksi ekonomi yang selalu berulang dan menghasilkan pencapaian yang bagus, dalam jangka panjang mempunyai ekspektasi untuk bertahan ketimbang relasi ekonomi yang dipenuhi dengan manipulasi. Modal sosial dalam bentuk ekspektasi dan kepercayaan inilah yang bisa ditransformasikan menjadi keunggulan untuk memperoleh benefit ekonomi (Yustika, 2008).

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan kredit yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa adanya keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit dipastikan tidak akan meneruskan sampai kepada pemberian kredit.

Berikut penjelasan Andrea selaku Kabag Kredit BPR XYZ Kabupaten Malang :

"Namanya ngasi kredit, mbak, itu sama dengan kita ngasi kepercayaan. Percaya dengan nasabah bahwa itikad mereka baik. Percaya pada kemampuan mereka, bahwa mereka bisa membayar angsuran. Dengan

penilaian 5C, kita akan tahu kemampuan bayar si nasabah. Jadi penentuan tenor kredit itu setelah observasi 5C, bukan atas permintaan nasabah. Karena yang lebih tahu kemampuan mereka adalah bagian surveyor kita. Data di kross cek dengan kenyataan lapang dan penilaian 5C. Masalah di acc, hampir 95% pasti di acc karena rata-rata yang datang ke sini adalah masyarakat sekitar. Pasti sudah ada referensi dari nasabah sebelumnya.”

Kepercayaan yang merupakan dasar bagi lembaga perkreditan untuk memberikan kredit kepada nasabah merupakan bagian dari modal sosial. Pelaksanaan pengendalian kredit memanfaatkan apa yang disebut modal sosial. Penyertaan modal sosial dalam pengendalian intern, berlaku bagi perusahaan, maupun nasabah BPR. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa baik nasabah maupun manajemen BPR merupakan komunitas yang saling berhubungan dalam satu perusahaan, sehingga mereka harus tunduk kepada peraturan perusahaan dalam hal ini adalah BPR XYZ Cabang Kepanjen. Hal ini mengakibatkan, setiap penyimpangan yang terjadi, siapapun yang melakukannya, dapat dikenai sanksi.

Nasabah dengan reputasi yang baik akan diasumsikan bahwa nasabah tersebut dapat dipercaya dan dapat bertanggungjawab terhadap kewajibannya. Apabila dalam hal kepercayaan nasabah tidak dapat menjaga apalagi tidak memiliki tanggungjawab atas apa yang dia lakukan, maka jelas hal ini akan membuat bank mengalami kerugian. Nasabah yang dapat diberi pinjaman adalah nasabah yang memiliki reputasi yang baik. Hal ini dapat diketahui dengan mencari dan mengumpulkan informasi dengan rekan atau siapapun yang berhubungan dengan nasabah yang terkait atau dengan melakukan wawancara sehingga data yang dibutuhkan lebih akurat dan valid.

Selain itu, BPR sebagai lembaga perkreditan formal menggunakan pula mekanisme pengendalian intern berbasis akuntansi yang diterapkan pada entitas bisnis pada umumnya. Jadi, ada dua mekanisme pengendalian yang berlaku

secara simultan pada BPR XYZ Cabang Kepanjen, yakni pengendalian yang mengikuti kaidah-kaidah struktur pengendalian intern, dan yang lainnya adalah pengendalian yang bertumpu pada penggunaan modal sosial yang dimiliki oleh perusahaan dan nasabah didalamnya.

Dalam menyalurkan kredit, bank tetap berjalan pada prinsip kehati-hatian dan berpatokan kepada 5-C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*). Kelayakan badan usaha atau seseorang penerima kredit berdasarkan pedoman 5-C adalah sebagai berikut: *Character* yaitu sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, prilaku, dan ketaatannya. *Capital* (pemodal) yaitu hal yang menjadi perhatian dari segi pemodal ini yaitu tentang besar modal dan struktur modal termasuk kinerja. *Capacity* (kemampuan) yaitu perhatian yang diberikan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan. *Collateral* (anggunan) yaitu kemampuan si calon debitur memberikan anggunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun ekonomi. *Condition of economy* (kondisi perekonomian) yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah.

Idealnya semua pedoman yang ada pada rumusan 5-C tersebut diterapkan seketat mungkin untuk menghindari adanya resiko dikemudian hari yang dapat mengganggu kelancaran hubungan kerjasama antara kreditur dengan debitur. Namun implementasi dilapangan khususnya pada BPR XYZ Cabang Kepanjen, kreditur lebih memperbesar porsi *Character* yaitu sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, prilaku, dan ketaatannya dalam menilai calon debitur yang mengajukan pinjaman, dibandingkan kriteria lainnya.

Menurut Kasmir (2000) jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga.

Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

4.3. Dampak Kredit Bermasalah Bagi BPR XYZ Cabang Kepanjen

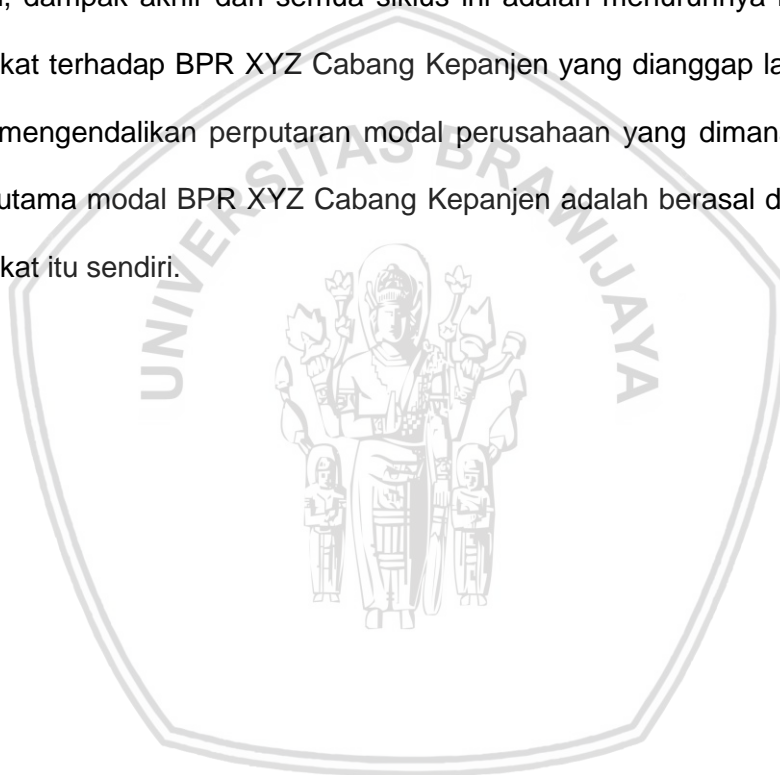
Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah merupakan risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Hampir semua perbankan memiliki kredit bermasalah, bahkan dalam beberapa kasus kredit bermasalah berakhir kepada penutupan beberapa bank. Sebagai lembaga bisnis dan keuangan, dalam lingkup yang luas perbankan harus dapat meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tetap terjaga. Adanya kredit bermasalah tentunya akan berdampak pada lembaga keuangan penyalur kredit yang dalam hal ini adalah BPR XYZ Cabang Kepanjen.

Beberapa dampak yang dirasa oleh BPR XYZ Cabang Kepanjen akibat terjadinya kredit bermasalah antara lain:

1. penurunan laba,
2. perputaran kas yang terganggu,
3. tingkat kesehatan bank menurun,
4. modal bank berkurang dan
5. tingkat kepercayaan nasabah menurun.

Ketika terjadi kredit bermasalah, hal utama dan pertama yang paling dirasakan oleh pihak BPR XYZ Cabang Kepanjen adalah poin nomor 2 yaitu

perputaran kas yang terganggu. Modal BPR tidak lah sebesar bank umum sehingga apabila terjadi kredit bermasalah maka dampak yang paling terasa adalah perputaran kas yang terganggu. Apabila perputaran kas terganggu, maka perolehan laba perusahaan juga akan mengalami gangguan dalam hal ini perolehan laba perusahaan akan berkurang. Penurunan laba perusahaan akan membuat modal bank juga berkurang. Dan berkurangnya modal bank akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Apabila tingkat kesehatan bank menurun, dampak akhir dari semua siklus ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BPR XYZ Cabang Kepanjen yang dianggap lalai dan tidak mampu mengendalikan perputaran modal perusahaan yang dimana salah satu sumber utama modal BPR XYZ Cabang Kepanjen adalah berasal dari tabungan masyarakat itu sendiri.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada nasabah dan BPR XYZ Cabang Kepanjen tentang keputusan nasabah dalam mengambil produk pinjaman dan keputusan BPR XYZ Cabang Kepanjen untuk menyetujui pengajuan kredit nasabah serta penanggulangan ketika terjadi kredit bermasalah dengan implementasi modal sosial, dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Dengan unsur jaringan sosial, kreditur akan mendapatkan info mengenai kedisiplinan debitur dalam mengangsur, karakter debitur menyikapi pinjaman yang mereka ajukan dan sebagainya. Jaringan sosial yang kuat akan semakin memperjelas karakter dan cara berperilaku terutama ketika mengatasi masalah kredit bermasalah. Tindakan yang pro aktif adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat seperti misalnya: berinisiatif menjaga keamanan lingkungan agar kondusif untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Termasuk menjaga nama baik bersama dimana pun berada dan terhadap pihak manapun.
2. Norma sosial yang berupa norma untuk tidak mencurangi orang lain akan mencegah debitur untuk melakukan tindakan yang akan merugikan mereka secara individu, mereka secara kelompok maupun pihak luar yang berinteraksi dengan mereka baik secara pribadi maupun kelompok. Dan didukung nilai-nilai yang diyakini oleh kelompok masyarakat, demi

menjaga keharmonisan baik melalui kompetisi, prestasi dan juga kerja keras. Norma sosial dan nilai-nilai yang dianut juga mempengaruhi perilaku pegawai bank. Mereka mengutamakan positif thinking atas semua yang terjadi dalam hubungan tersebut. Dan selalu mendahulukan cros check kondisi lapang sebelum menilai keterlambatan atau gagal bayar nasabah.

3. Resiprocity sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak baik itu dari sisi kreditur maupun dari sisi debitur. Dengan adanya resiprocity, membuat sistem referensi nasabah semakin handal dan terpercaya. Petugas lapang dengan adanya referensi dari nasabah terpercaya sebelumnya, dapat mempersingkat waktu penilaian karakter calon debitur selanjutnya. Semakin singkatnya waktu yang dibutuhkan oleh petugas lapang untuk melakukan screening calon debitur, semakin cepat pula bantuan modal dicairkan oleh pihak bank.
4. Kepercayaan yang merupakan dasar bagi lembaga perkreditan untuk memberikan kredit kepada nasabah merupakan bagian dari modal sosial. Nasabah yang dapat diberi pinjaman adalah nasabah yang memiliki reputasi yang baik. Nasabah dengan reputasi yang baik akan diasumsikan bahwa nasabah tersebut dapat dipercaya dan dapat bertanggungjawab terhadap kewajibannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan modal sosial untuk mengikat kerja sama antara nasabah dengan BPR XYZ Cabang Kepanjen mampu membawa dampak positif selama dalam pelaksanaannya tetap berjalan secara prinsipil, tidak penuh permisif dari pihak BPR XYZ Cabang Kepanjen. Petugas lapang yang berinteraksi langsung dengan masyarakat atau nasabah, harus tetap luwes dalam berinteraksi namun memegang hal-hal prinsip yang tidak boleh dilonggarkan agar tidak terjadi kredit bermasalah.
2. Itikad nasabah tidak bisa dinilai secara kasat mata. Pihak BPR XYZ Cabang Kepanjen harus konsisten ketika suatu perjanjian telah dilanggar maka nasabah harus dimasukkan daftar tersendiri dan dimonitoring serta dilakukan pendekatan yang lebih intensif lagi.
3. Menjalankan aturan perusahaan dan digabungkan dengan norma yang terkandung dalam modal sosial membutuhkan waktu yang tidak sebentar oleh karena itu pihak BPR XYZ Cabang Kepanjen harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat serta tetap tegas mengenai aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T. 2010. Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal E-Mabis FE-Unimal*, Volume 11, Nomor 3, Oktober 2010
- Adhikari, Krishna Prasad. 2009. Social Capital and its "Downside"; The Impact on Sustainability of Induced Community-Based Organization Nepal. *World Development* Volume 38 No (2): pp.184-194.
- Badaruddin. 2005. Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Komunitas (Studi pada Komunitas Petani Karet di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Jurnal Wawasan*. Vol 12(2)
- Bourdieu, Pierr, 1986. *The Forms of Capital*, dalam Richardson, J.G. (ed), *Handbook of Theory and Research for The Sociology of Education*, Greenwood Press, New York.
- Coleman, J. 2008. *Dasar-dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Creswell, John W. 1994. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks: Sage.
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Farhan, M., Ammara S., Abrar HC., dan Fareeha K. 2012. Economic Determinants of Non-Performing Loans: Perception of Pakistani Bankers. *European Journal of Business and Management*. ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol 4, No.19, 2012
- Furubotn, Eirik G dan Rudolf Richter. 2005. *Institutions and Economic Theory, The Contribution of the New Institutional Economics*. Second Edition. The university of Michigan Press.
- Hamidi. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis, Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hasbullah, FH. 2006. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, Jilid 2. Jakarta: Ind-Hill Co
- Hasibuan, Drs. H. Malayu S.P. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara: Jakarta
- Hendrojogi, 2006. *Koperasi : Asas-Asas, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hidayati, B. 2014. Peran Modal Sosial Pada Kontrak Pinjaman Bank Thithil dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Usaha (Studi Pada Pasar Blimbing Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*
- Hughes, Mathew and Robert K. Perrons. 2010. Shaping and re-shaping social capital in buyer–supplier relationships. *Journal of Business Research*: 2-8
- Jousairi, H. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta, MR-United Press.
- Kadarisman, Y. 2015. Peran Modal Sosial (*Social Capital*) Dalam Aktivitas Ekonomi Pedagang di Desa Guntung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Disampaikan pada *Seminar Nasional Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik”* Pekanbaru, 17-18 November 2015.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Lofland, Lofland John. 1984. *Analyzing Social Setting: a Guide to Qualitative (Bervation and Analisis)*. Wadsworth Publishing Company: Belmont, California.
- Mahmoeddin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitataif*. Jakarta, UI Press.
- Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhsinati, S. 2011. *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank “X” di Kabupaten Jember*. Skripsi. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Jember, Universitas Jember.
- Munte M.H.M., dan Santi P.S. 2014. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Fakultas Ekonomi, Medan, Universitas HKBP Nommensen.
- Nusantara, Ahmad Buyung. 2009. Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Periode 2005-2007). *Tesis*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Putnam, R.D 1993. The prosperous community: Social capital and public life. *The American Prospect*. Vol.4, no. 13
- Quddus, Munir, Michel Goldsby, Mahmud Farooque. 2000. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. A review Article. *Eastern Economic Journal*, 26, (1): 87-98.

- Quigley, Kevin F.F. 1996. Human Bonds and Social Capital. Review Essays. Trust: *The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. By Francis Fukuyama. Free Press, 1995, 457, New York: 333-341
- Ratnasari, E. 2014. Upaya Manager Pada Credit Union Dalam Menanggulangi Kredit Macet. Jurnal Fokus, Jilid 12, Nomor 2, Maret 2014, hlm. 178-186
- Rivai H. Veithzal & Permata Andria. 2006. *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sheefeni, JPS. 2015. Evaluating the Impact of Bank Specific Determinants of Non-performing Loans in Namibia. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB) *An Online International Research Journal* (ISSN: 2306-367X) 2015 Vol: 4 Issue 2
- Sudirman. 2006. *Manajemen Perbankan Edisi Pertama*. Denpasar: PT BP.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Suharto E. 2006. Modal Sosial dan Kebijakan Publik. [Internet]. [diunduh 2017 Apr 1]. Tersedia pada: http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/MODAL_SOSIAL_DAN_KEBIJAKAN_SOSIA.pdf
- Supardan, D. 2007. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suyanto, Bagong. 2002. *Permasalahan-Permasalahan Strategis dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya: Makalah untuk Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2002 Propinsi Jawa Timur
- Suyatno, T., et. al. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usaman, R. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya A. 2011. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok*. Tesis. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Magister Kenotariatan.
- Wilamarta, M., dan Zulfadli Barus. 2012. Manfaat Analisis Yuridis Dan Sosiologis Yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Bank Sebagai Kreditor. Yustisia Vol.1 No.2 Mei - Agustus 2012
- Yuliarmi, NN. 2011. Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan di Provinsi Bali. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana email: nyuliarmi@yahoo.com
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Ekonomi Kelembagaan*, Definisi, Teori dan Strategi. Malang, Banyumedia Publishing

Lampiran

Lampiran 1 : waktu meminta ijin kepada komisaris bpr xyz untuk melakukan penelitian di kantornya.



Sumber data : kantor bpr xyz

Lampiran 2 : wawancara kepada bagian pengajuan kredit



Sumber data : kantor bpr xyz

Lampiran 3 : wawancara pada bagian kredit



Sumber data : kantor bpr xyz

Lampiran 4 : wawancara bagian Ao



Sumber data : kantor bpr xyz